

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MELALUI PENGELOLAAN LAHAN PESISIR PANTAI
OLEH KELOMPOK SADAR WISATA
DI DESA LEMBUPURWO, KECAMATAN MIRIT, KABUPATEN
KEBUMEN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Gelar Sarjana Sosial
(S.Sos)**

**Oleh :
Alpinurissangadah
NIM : 2017104072**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
JURUSAN KONSELING DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alpinurissangadah

NIM : 2017104072

Jenjang : S-1

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Fakultas : Dakwah

Menyatakan bahwa dengan ini saya yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lahan Pesisir Pantai Oleh Kelompok Sadar Wisata di Desa Lembupurwo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen”. Menyatakan benar bahwa ini adalah karya saya pribadi dan dalam proses penulisan tidak melakukan plagiat dalam menyusun penelitian ini. Adapun kutipan yang saya kutip dalam karya ini, saya cantumkan sumber kutipan di skripsi ini.

Saya akan bersedia melakukan penelitian kembali apabila terbukti dalam penelitian saya ini terdapat plagiat penelitian orang lain.

Purwokerto, 25 November 2023
Peneliti,



Alpinurissangadah
NIM. 2017104072



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS DAKWAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553, www.uinsaizu.ac.id

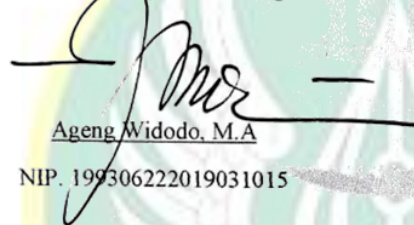
PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LAHAN PESISIR PANTAI
OLEH KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA LEMBUPURWO, KECAMATAN MIRIRT,
KABUPATEN KEBUMEN**

Yang disusun oleh **Alpinurissangadah** NIM. 2017104072 Program Studi **Pengembangan Masyarakat Islam** Jurusan **Jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat Islam** Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifudin Zuhri, telah diujikan pada hari Jum'at tanggal **19 Januari 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Sosial (S.Sos)** dalam **Pengembangan Masyarakat Islam** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

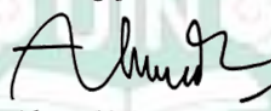
Ketua Sidang/Pembimbing


Ageng Widodo, M.A
NIP. 199306222019031015

Sekretaris Sidang/Penguji II


Nurul Khotimah, M.Sos
NIP. 199408152023212041


Penguji Utama


Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si
NIP. 197911152008011018

Mengesahkan,

Purwokerto, **23 - 1 - 2024**

Dekan,


Dr. Muskinul Fuad, M.Ag.
NIP. 197412262000031001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Dakwah

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan saran, maka melalui surat ini saya menyampaikan skripsi dari :

Nama : Alpinurissangadah

NIM : 2017104072

Jenjang : S-1

Program Studi : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

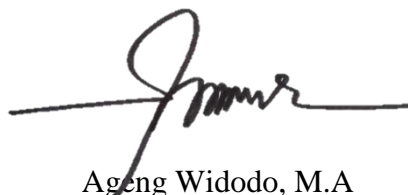
Fakultas : Dakwah

Judul Skripsi : Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lahan Pesisir Pantai
Oleh Kelompok Sadar Wisata Di Desa Lembupurwo,
Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 25 November 2023
Dosen Pembimbing,



Ageng Widodo, M.A
NIP. 199306222019031015

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada mereka sendiri”

(Qs. Ar Rad : 11)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan segala nikmat dan karunia sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis ucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang senantiasa membantu, baik itu do'a maupun tindakan. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang tercinta :

1. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Alm. Sulaiman dan Ibu Siti Maesaroh yang telah memberikan banyak do'a yang tiada henti kepada penulis. Serta kasih sayang yang begitu tercukupi hingga putrinya ini dapat menyandang gelar sarjana. Skripsi ini juga sebagai bentuk bukti kepada kedua orang tua saya dalam tanggung jawab saya menyelesaikan jenjang S-1.
2. Dosen Pembimbing Bapak Ageng Widodo, M.A terima kasih banyak atas segala kesempatan waktu, arahan, saran dan tentunya kesabaran untuk membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
3. Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan Prodi Pengembangan Masyarakat Islam yang telah memberikan pengalaman, wawasan, dan pengetahuan kepada penulis selama penulis kuliah.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT. Yang maha pengasih dan maha penyayang, penulis panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan nikmat sehat serta nikmat sempat, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lahan Pesisir Pantai oleh Kelompok Sadar Wisata Di Desa Lembupurwo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen”**. Sholawat dan salam penulis tetap tucurahkan kepada junjungan kita nabi agung Muhammad SAW yang kelak kita nantikan syafa'atnya di yaummul qiyamah. Aamiin.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K. H Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Muskinul Fuad, M. Ag. Dekan Fakultas Dakwah.
3. Dr. Ahmad Muttaqin, M.Si Wakil Dekan I Fakultas Dakwah.
4. Dr. Nawawi, M. Hum Wakil Dekan III Fakultas Dakwah sekaligus Penasihat Akademik yang memberikan motivasi serta dorongan dalam proses studi.
5. Nur Azizah, M. Si. Ketua jurusan Konseling dan Pengembangan Masyarakat. Terimakasih ibu, telah memberikan semangat peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Imam Alfi, M. Sos. Koordinator Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Terima kasih bapak, telah memberikan semangat kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Ageng Widodo, M. A. Pembimbing skripsi. Terimakasih bapak, telah memberikan arahan serta saran yang baik pada setiap bimbingan dengan sabar, dan selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan cepat dan baik.

8. Cokro Aminoto, Kepala Desa Lemburpurwo beserta jajarannya. Marjuki, Ketua Kelompok Sadar Wisata beserta jajarannya.
9. Seluruh pihak informan yang telah memberikan informasi dan data dengan sukarela kepada penulis guna kelancaran penelitian skripsi ini.
10. Orang tua penulis, Ibu Siti Maesaroh dan Alm. Bapak Sulaiman yang telah memberikan kasih sayangnya yang tidak terhingga, baik dari segi materi maupun wejangan-wejangan beliau yang penulis jadikan sebagai semangat dan pedoman hidup. Terimakasih sudah selalu ada untuk penulis, sehingga penulis merasakan keamanan yang nyaman.
11. Kakak Anisah Rohmatul Muhlisoh dan Adik Lailatul Isti Qomah yang telah memberikan banyak kebahagiaan, kesetiaan membersamai dihidup penulis. Terimakasih sudah selalu memberikan semangat dan selalu mensupport penulis hingga saat ini.
12. Kepada keluarga Bani Saifuddin dan Bani Dulah Roji yang telah menjadi motivasi penulis supaya dapat menyandang gelar sarjana dengan cepat dan baik.
13. Teman seperjuangan penulis Nadia Suci Permatasari, Latifah Diah Palupi, Zahra Apriliani Fadhilah terimakasih selalu memberikan dorongan dan motivasi serta selalu memberikan kesenangan kepada penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat untuk selalu bertukar pikiran, tempat berkeluh kesah serta memberikan semangat untuk meyakinkan bahwa kita pasti bisa.
14. Teruntuk seseorang yang lahir pada 15 November 2001, M. Novanda Ramadani P, terimakasih telah menjadi support system terbaik yang telah memberikan banyak kebahagiaan. Selalu memastikan penulis dalam kondisi baik-baik serta meyakinkan penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan cepat dan tepat.
15. Santriwati Pak Ishak, ada Inayatul, Damayanti, Shinta, Sri Puji, Wiyah, Zainatun yang selalu memberikan positif vibes kepada penulis.
16. Teman pondok penulis Nurfiyatun, Sabila, Risma, Serlina, Valent, Septi, Yuni, Mba Atika, yang memberikan keceriaan kepada penulis serta banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

17. Teman penulis Nurul, Fathan, Dea, Irna, Putri yang sudah menjadi support yang baik di kos.
18. Kepada teman-teman PMI B angkatan 2020, khususnya Gina, Anisah, Risma, Krisna, Ismi terimakasih telah banyak membantu penulis dalam penyelesaian kuliah ini.
19. Kepada Pondok Pesantren Nurul Iman, Khususnya Abah Yai M. Tohirin AZM dan Ibu Nyai. Hj. Siti Zahroh, S.Pd sak keluarga yang telah memberikan banyak ilmu beserta wejangan kepada penulis sehingga penulis dapat menjadi pribadi yang paham mengenai agama. Juga kepada teman-teman pondok angkatan 2020 yang sudah menjadi teman seperjuangan di pondok.
20. Kepada teman-teman organisasi kemahasiswaan, Staff SEMA Fakultas Dakwah 2021, Dema Fakultas Dakwah 2022 dan berbagai kepanitiaan lainnya.
21. Dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan sebagai ungkapan terima kasih, kecuali doa kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan, diberikan jalan rezeki, dan keberkahan dunia dan akhirat. Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan kebermanfaatan bagi keilmuan dan kehidupan masyarakat. Aamiin

Purwokerto, 25 November 2023
Penulis,

Alpinurissangadah
NIM. 2017104072

**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI LAHAN PESISIR
PANTAI OLEH KELOMPOK SADAR WISATA DI DESA
LEMBUPURWO, KECAMATAN BONOROWO, KABUPATEN
KEBUMEN**

**ALPINURISSANGADAH
NIM. 2017104072**

E-mail : 2017104072@mhs.uinsaizu.id

Fakultas Dakwah Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses pembentukan masyarakat supaya dapat berinisiatif dalam melakukan kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Desa Lembupurwo merupakan desa yang memiliki potensi yang baik. Dilihat dari banyaknya kearifan lokal yang ada, seperti adanya potensi fisik yaitu pertanian, perikanan, peternakan, dan wisata. Kemudian potensi non fisik dilihat dari tingkat sosialisasi yang ada dimasyarakat yang dinilai sudah baik, gotong royong masyarakat juga baik. Hanya saja masih banyak masyarakat yang belum bisa mengelola potensi yang sudah ada dengan baik.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : Bagaimana strategi pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lahan pesisir pantai oleh kelompok sadar wisata di Desa Lembupurwo, Kecamatan Bonorowo, Kabupaten Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat supaya dapat mengelola lahan dengan benar dan memanfaatkan potensi desa yang ada melalui peran kelompok sadar wisata. Penelitian ini dilakukan di Desa Lembupurwo menggunakan metode kualitatif. Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder dan primer. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata di Desa Lembupurwo melalui empat tahapan, yaitu persepsi masalah, kesadaran, pengkapasitasan, dan pendayaan. Serta dengan melakukan strategi pemberdayaan melalui pengembangan SDM, pengembangan kelompok, pemupukan modal masyarakat, dan pengembangan usaha produktif.

Kata kunci : Pemberdayaan Masyarakat, potensi lokal, Kelompok sadar wisata

**COMMUNITY EMPOWERMENT THROUGH COASTAL LAND BY A
TOURISM AWARENESS GROUP IN LEMBUPURWOVILLAGE,
BONOROWO SUBDISTRICT, KEBUMEN DISTRICT**

ALPINURISSANGADAH
NIM. 2017104072

E-mail : 20171072@mhs.uinsaizu.id

Faculty of Da'wah Islamic Community Development Study Program (PMI)

ABSTRACT

Community Empowerment is a process of forming a community so that it can take the initiative in carrying out social activities to improve its own situation and conditions. Lembupurwo Village is a village that has good potential. Judging from the amount of local wisdom that exists, such as the physical potential, namely agriculture, fisheries, animal husbandry and tourism. Then the non-physical potential is seen from the level of socialization in the community which is considered to be good, community mutual cooperation is also good. It's just that there are still many people who cannot manage the existing potential well.

The problem formulation in this research is: What is the strategy for community empowerment through coastal land management by tourism awareness groups in Lembupurwo Village. This research aims to empower the community to manage land properly and utilize existing village potential through the role of tourism awareness groups. This research was conducted in Lembupurwo Village using qualitative methods. The data sources used are secondary and primary data. In collecting data, this research used observation, interview and documentation methods.

The results of this research show that the empowerment process carried out by tourism awareness group in Lembupurwo Village went through four stages, namely problem perception, awareness, capacity building, and empowerment. As well as by carrying out empowerment strategies through human resource development, group development, cultivating community capital, and developing productive businesses.

Keywords: Community Empowerment, local potential, Tourism awareness group

DAFTAR ISI

PERYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Penegasan Istilah	8
C. Rumusan masalah	10
D. Tujuan penelitian	10
E. Manfaat penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	11
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat	17
1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat	17
2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	21
3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	23
4. Faktor Penghambat	24
5. Faktor Pendorong Pemberdayaan Masyarakat	26
B. Partisipasi Masyarakat	27
C. Desa Wisata	28
1. Pengertian Desa Wisata	28
2. Unsur-Unsur Desa Wisata	30
3. Kategori Desa Wisata	31

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 33
- B. Tempat dan Waktu Penelitian 33
- C. Objek dan Subjek 33
- D. Sumber Data 34
- E. Teknik Pengumpulan Data 35
- F. Metode Analisis Data 37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata Desa Lemburpurwo 39
 - 1. Asal Usul Desa Lemburpurwo 39
 - 2. Terbentuknya Desa Wisata 42
 - 3. Produk yang Dihasilkan Oleh Pesisir Desa Wisata 44
- B. Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata melalui Pengelolaan Lahan Pesisir 46
 - 1. Persepsi Masalah 48
 - 2. Penyadaran 49
 - 3. Pengkapasitasan 52
 - 4. Pendayaan 54
- C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata Dalam Pengelolaan Lahan Pesisir 56
 - 1. Pengembangan Sumber Daya Manusia 56
 - 2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok 58
 - 3. Pemupukan Modal Masyarakat 59
 - 4. Pengembangan Usaha Produktif 62

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 64
- B. Saran 65

DAFTAR PUSTAKA64

LAMPIRAN.....69

RIWAYAT HIDUP92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Perkebunan sayur-sayuran di Lahan Brosengojo.....	85
Gambar 3.2	Perkebunan Palawija di Lahan Brosengojo.....	85
Gambar 3.3	Lokasi Lahan Pesisir Pantai (Tanah Brosengojo)	85
Gambar 3.4	Kebun Kelengkeng di Lahan Pesisir Pantai	86
Gambar 3.5	Penyemprotan Obat Hama yang dibuat sendiri oleh Masyarakat	86
Gambar 3.6	Wawancara peneliti dengan Anggota Pokdarwis Bapak Sugito di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen	86
Gambar 3.7	Wawancara Peneliti dengan Kepala Desa Lembupurwo Bapak Cokro Aminoto di Desa Lembupurwo	87
Gambar 3.8	Wawancara Peneliti dengan Ketua Pokdarwis Bapak Marjuki di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen	87
Gambar 3.9	Wawancara Peneliti dengan Masyarakat yang paling dekat dengan Pesisir Pantai Bapak Karto di Desa Lembupurwo	87
Gambar 3.10	Wawancara Peneliti dengan Bapak Marwan selaku Masyarakat dan Bapak Wawan selaku Ketua BUMDES di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen	88
Gambar 3.11	Pembibitan Tumbuhan Mangrove di Pesisir Pantai Laguna Lembupurwo oleh Masyarakat dan Pokdarwis	88
Gambar 3.12	Pelatihan Pembuatan Pupuk yang dilakukan oleh Pokdarwis dan Dinas Peertanian dan diikuti oleh Masyarakat Desa Lembupurwo	88
Gambar 3.13	Pertemuan Rutin Pokdarwis dengan Masyarakat di Pendopo Pantai Laguna Lembupurwo	89
Gambar 3.14	Rapat Kerjasama Pokdarwis oleh Dinas Kelautan dan Pemerintah Desa Lembupurwo	89
Gambar 3.15	Penyuluhan dari Dinas Pariwisata dan Polsek Mirit kepada Masyarakat Desa Lembupurwo di Pendopo Pantai Laguna	89

Gambar 3.16	Pertemuan rutin Pengurus Pokdarwis di Pendopo Pantai Laguna.....	90
Gambar 3.17	Proses Pembibitan Tanaman Bakau yang dilakukan oleh Pokdarwis di Pantai Laguna Lembupurwo	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Dalam mengembangkan suatu wilayah, dibutuhkan beberapa perspektif yang memiliki kedudukan utama dalam meningkatkan devisa negara. Salah satu devisa negara yang berada di daerah pesisir adalah dalam sektor pariwisata dan pertanian. Pariwisata adalah salah satu sumber pemasukan ekonomi negara terbesar selain dari bidang tambang yang memiliki potensi tinggi dan mempunyai kedudukan penting dalam upaya pembangunan ekonomi negara. Pariwisata merupakan migrasi semi permanen yang dilakukan manusia yang bertujuan untuk keluar dari aktivitas rutin serta keluar dari zona nyamannya. Pekerjaan yang mereka kerjakan selama tinggal di tempat yang mereka inginkan serta adanya fasilitas dibuat sebagai upaya pemenuhan kebutuhan mereka.¹

Pariwisata merupakan suatu jenis kegiatan wisata yang di didorong oleh berbagai fasilitas dan sarana prasarana yang memadai serta telah disiapkan atau discawiskan oleh masyarakat, panitia, maupun pemerintah daerah.² Perkembangan wisata merupakan hajat dari pemerintah guna mempercepat upaya peningkatan kesempatan kerja serta untuk kesetaraan penghasilan masyarakat, terutama untuk masyarakat yang bergerak pada bidang pariwisata.³

Saat ini wisata bahari atau pantai merupakan pariwisata yang banyak diminati oleh penduduk setempat dan wisatawan lainnya. Karena wisata bahari ini memiliki kemampuan atau potensi meningkatkan pengunjung lokal atau non lokal, salah satunya yaitu pariwisata pantai. Kapasitas yang dimiliki setiap daerah biasanya ditinjau dari beberapa objek wisata yang telah terkenal oleh masyarakat luas. Tak lain dengan wisata yang berada di Kebumen.

¹ Wahyuni D, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Mengembangkan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul*, (2018), hal. 20.

² Victoria br. Simanungkalit et.al., *Buku Panduan Pengembangan Wisata Hijau* (2018), hal. 2.

³ Oka A. Yoeti, *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata* (2018), hal. 27.

Kebumen menjadi icon yang mempunyai aneka macam pantai yang indah nan asri. Kabupaten Kebumen adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah yang mempunyai potensi tinggi pada sektor wisata hayatinya seperti Pantai, Goa, Curug, Danau dan Bendungan dan sebagainya.

Kebumen merupakan kabupaten di Jawa Tengah yang terletak di pesisir selatan Pulau Jawa. Kabupaten Kebumen terletak antara 70 27' – 70 50' Lintang Selatan dan 109 33' – 109 50' Bujur Timur dengan luas wilayah 1.581,11 km² serta pesisir yang luas yaitu 36,6 km² dan panjang pantai 57,5 km. Kebumen sendiri memiliki 21 macam pantai yang indah, salah satunya yaitu Pantai Laguna Lembupurwo. Tercatat pada tahun 2017 bahwa wisatawan yang mengunjungi Pantai Laguna sebanyak 21.900 orang. Berdasarkan data tersebut maka sudah diketahui bahwa peminat dari wisata pantai ini begitu banyak. Tahun 2018 terakhir beberapa pihak ikut berpartisipasi membantu masyarakat salah satunya yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan ikut melakukan reboisasi tanaman mangrove pada kawasan sepanjang dua kilometer, dengan luas sekitar 10 hektare. Hal ini dilakukan sebagai bukti pelestarian ekosistem di laut.

Pantai Laguna adalah pantai di ujung selatan desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tepatnya di wilayah Kebumen paling timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Pantai ini memiliki karakteristik tersendiri yaitu dengan adanya perkebunan bakau, gumuk pasir yang indah nan luas serta pantainya yang indah nan asri. Tak hanya itu, pantai ini juga memiliki lahan pesisir yang dapat dikatakan luas. Sehingga banyak masyarakat yang masih belum mampu mengoptimalkan lahan tersebut.

Menindaklanjuti pada minimnya pengelolaan lahan pesisir oleh masyarakat, maka pada tahun 2016 masyarakat Desa Lembupurwo membentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Karena dengan adanya Pokdarwis ini, diharapkan nantinya lahan pesisir pantai dapat dikelola dengan baik. Dapat dimulai dari penanaman bibit pohon cemara di pesisir pantai dan

melakukan reboisasi terhadap bibit bakau di rawa-rawa. Karena jika tidak dilakukan hal tersebut, lahan pesisir pantai akan terasa gersang dan membuat nilai minus dalam daya tariknya kepada pengunjung. Dilihat dari sepanjang pesisir pantai, masih banyak lahan pertanian yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh warga setempat. Oleh karena itu, perlu adanya pendampingan serta arahan terhadap warga untuk dapat membantu pengelolaan lahan pesisir pantai tersebut yang dapat dijadikan sebagai lahan pertanian yang bermanfaat.

Lahan pertanian memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan pangan secara menyeluruh. Namun, pada saat ini lahan pertanian menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang dapat mempengaruhi produktivitasnya. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan lahan pertanian meliputi perubahan iklim, urbanisasi, degradasi lahan, dan penggunaan teknologi pertanian yang tidak optimal.

Selain itu, urbanisasi yang pesat juga berdampak pada luas lahan pertanian yang semakin menyusut. Pertumbuhan populasi di perkotaan menyebabkan konversi lahan pertanian menjadi pemukiman atau infrastruktur. Akibatnya, lahan yang tersedia untuk pertanian menjadi terbatas, sehingga menyulitkan petani untuk memperluas usaha pertanian mereka. Degradasinya lahan juga menjadi masalah serius dalam pertanian. Praktik-praktik pertanian yang tidak berkelanjutan, seperti penggunaan pestisida berlebihan, erosi tanah, dan penurunan kualitas tanah, dapat menyebabkan degradasi lahan. Hal ini mengurangi kesuburan tanah, menghambat pertumbuhan tanaman, dan mengurangi produktivitas lahan pertanian secara keseluruhan.

Penggunaan teknologi pertanian yang tidak optimal juga berkontribusi terhadap permasalahan lahan pertanian. Beberapa petani masih menggunakan metode pertanian tradisional yang kurang efisien, sehingga menghadapi tantangan dalam meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan pertanian. Kemajuan teknologi seperti irigasi cerdas, penggunaan pupuk organik, dan pendekatan pertanian berbasis data dapat membantu meningkatkan produktivitas lahan pertanian, tetapi penerapannya masih terbatas.

Seperti yang dijelaskan pada penelitian terdahulu, penelitian yang berjudul “Pengembangan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Gili Gede Sekotong Kabupaten Lombok Barat” yang ditulis oleh Masrun, Akhmad Jupri, dan M. Firmansyah. Penelitian ini membahas tentang pengembangan destinasi wisata dengan tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui usaha kecil mikro untuk meningkatkan pengetahuan serta perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Program pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pengembangan pariwisata di wilayah pantai dengan harapan masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Hasil penelitian ini adalah adanya pendampingan serta pelatihan guna memecahkan suatu permasalahan sebagai salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat, kemudian ditinjau dari sektor ekonomi hal ini menguntungkan masyarakat karena mereka merasa terbantu adanya destinasi wisata Pantai Gili.⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang strategi pemanfaatan lahan disekitar pantai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan sumberdaya didesa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan lahan yang nantinya dijadikan sebagai metode untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Telah dijelaskan pula pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan dan Perlindungan Lingkungan Hidup bahwasanya dalam melakukan melestarikan ekosistem, perintah pengelolaan lingkungan hidup dengan baik, hak perizinaan, hak dan kewajiban masyarakat serta pihak-pihak yang sudah mengusahakan kelestarian lingkungan hidup, menjaga serta melindungi dan menegakkan lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang tersebut sudah dijelaskan secara rinci bahwa masyarakat mempunyai wewenang dalam mengelola dan memiliki hak serta kewajiban dalam konservasi dan keberlangsungan lingkungan hidup. Oleh karena itu,

⁴ Masrun et.al., *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Gili Gede Sekotong Kabupaten Lombok Barat* (2019), hal. 32.

masyarakat di berikan tugas dan tanggung jawab untuk membantu mengelola lingkungan demi melestarikan wisata bahari yang sudah ada.

Menurut Pasal 3, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 membahas mengenai Pelestarian keanekaragaman hayati, “Negara telah menyelenggarakan pemanfaatan lingkungan hidup dengan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk menciptakan *sustainable development* yang memiliki pemahaman tentang lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pengembangan masyarakat universal yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”⁵ Pasal tersebut menjelaskan secara gamblang bahwa untuk melestarikan Lingkungan Hidup itu sudah menjadi tanggung jawab masyarakat setempat. Karena hal ini akan menjadikan timbal balik terhadap masyarakat itu sendiri.

Lahan pesisir pantai merupakan wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim. Selain itu, lahan pesisir juga sering menjadi tempat akhir bagi limbah manusia dan industri. Dengan begitu ekosistem pesisir yang penting bagi kehidupan manusia dan keanekaragaman hayati menjadi rusak. Oleh karena itu, pentingnya menjaga kelestarian alam yang ada dipesisir pantai guna menyeimbangkan ekosistem laut dan sekitarnya supaya tidak rusak dan punah. Salah satu caranya mungkin dengan pemanfaatan lahan dengan benar. Misalnya lahan pesisir tersebut digunakan untuk pertanian, taman, dan sejenisnya dengan catatan tidak merusak ekosistemnya. Karena dengan begitu nantinya juga akan bermanfaat bagi masyarakat itu sendiri.

Lahan pesisir pantai merupakan salah satu ekosistem yang penting dan memiliki nilai ekologis, ekonomis, dan sosial yang tinggi. Namun, lahan pesisir pantai menghadapi sejumlah permasalahan yang dapat mengancam keberlanjutan ekosistem tersebut. Permasalahan tersebut meliputi erosi pantai, intrusi air laut, degradasi ekosistem, dan konversi lahan untuk pembangunan.

Erosi pantai merupakan salah satu permasalahan utama yang mempengaruhi lahan pesisir pantai. Faktor-faktor seperti gelombang laut, arus, dan angin dapat menyebabkan erosi pantai yang berdampak pada hilangnya

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

material tanah pantai. Erosi pantai mengakibatkan hilangnya habitat alami, terutama bagi tumbuhan dan satwa yang hidup di wilayah pesisir. Selain itu, erosi pantai juga dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur pantai seperti jalan, pemukiman, dan fasilitas wisata.

Mempertimbangkan pentingnya keberlanjutan ekosistem pesisir pantai, penelitian yang mendalam mengenai permasalahan lahan pesisir menjadi sangat relevan. Dengan memahami tantangan yang dihadapi oleh lahan pesisir pantai, tindakan yang tepat dapat diambil untuk menjaga keberlanjutan ekosistem dan melindungi sumber daya alam yang berharga. Melalui analisis komprehensif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi lahan pesisir pantai, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik tentang permasalahan lahan pesisir pantai dan implikasinya terhadap keberlanjutan ekosistem, serta untuk mengidentifikasi strategi dan kebijakan yang dapat mempromosikan pengelolaan lahan pesisir yang berkelanjutan.

Penelitian menunjukkan bahwa dengan melestarikan lingkungan hidup yang dimaksudkan disini adalah pengelolaan pesisir pantai, dapat menjadikan peluang serta potensi bagi masyarakat dalam meningkatkan ataupun menunjang perekonomian warga Desa Lembupurwo tersebut. Kemudian telah dibuktikan juga dengan penelitian terdahulu bahwa dengan cara melestarikan pantai serta ekosistem lautnya, maka daya tarik wisatawan semakin besar. Dengan begitu maka, taraf perekonomian desa akan meningkat. Sehingga dapat menjadikan masyarakat lebih terberdaya atau lebih sejahtera. Selain itu, dengan adanya pemanfaatan lahan wisata dengan baik dan benar juga akan menguntungkan masyarakat Desa Lembupurwo, karena mereka sendiri akan memiliki lingkungan yang dikategorikan nyaman menurut perspektif mereka.

Daerah di Pantai Laguna tersebut dapat dikatakan sebagai lahan yang cocok serta subur untuk ditanam berbagai macam buah dan sayuran seperti semangka, melon, pepaya, tomat, cabai, terong dan lain sebagainya. Ditinjau dari berbagai aspek banyak sekali potensi atau keunggulan dari daerah pesisir Pantai Laguna Lembupurwo, tapi sayangnya masih banyak masyarakatnya yang belum mampu memanfaatkannya. Masyarakat masih merasa kesulitan

untuk menindak lanjuti pengelolaan lahan serta pelestarian ekosistem nya. Karena kurangnya pendampingan dari pemerintah dan pihak yang terkait. Selain itu, masyarakat juga masih lemah dalam bidang teknologi nya. Serta kurangnya fasilitas yang mereka gunakan dalam memanfaatkan keadaan lahan disekitar pesisir pantai.

Secara teoritis dilihat dari perspektif model pengembangan masyarakat, adanya ekowisata bahari ini jelas menjadi salah satu penunjang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan melestarikan lingkungan di wilayah Pantai ini masyarakat menjadi memiliki akses untuk mengelolanya. Karena dengan hal tersebut dapat menjadikan daya tarik pengunjung ataupun wisatawan tinggi. Hal tersebut juga relevan dengan Undang-undang No. 5 tahun 1990 yang membahas mengenai Pemanfaatan Sumber Daya Alam berbasis Hayati terhadap perlindungan sistem keberlangsungan hidup, pelestarian keanekaragaman hayati beserta lingkungannya, kawasan suaka alam, serta mekanisme pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pelestarian ekosistem hayati.⁶

Untuk mencapai kesempurnaan dalam suatu pemberdayaan, perlu adanya SDM yang berkualitas dan harus memiliki dedikasi yang tinggi supaya program tersebut berjalan dengan lancar, efektif dan sesuai dengan rencana. Pemberdayaan merupakan sebuah mekanisme perubahan lalu mempunyai struktur yang penting, yang berarti peluang terjadinya proses pemberdayaan sangat bergantung dalam dua hal, yang pertama adalah kewenangan sementara. Dengan kata lain jika kewenangan tersebut tidak berubah, maka pemberdayaan juga tidak mungkin terlaksana dengan metode apapun. Kemudian yang kedua, yaitu kekuasaan yang universal. Prinsip ini memfokuskan pada definisi kewenangan yang dinamis.

Untuk mengatasi permasalahan warga tersebut, maka diperlukan adanya pendampingan, praktik serta bantuan dana dari pemerintah dalam mengintegrasikan model pengembangan masyarakat melalui Kelompok Sadar

⁶ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, *Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*.

Wisata (Pokdarwis) tersebut. Supaya masyarakat dapat memahami kedepannya program apa saja yang nantinya akan mereka laksanakan. Kemudian dengan adanya pendampingan tersebut, maka dapat dimungkinkan bahwa masyarakat akan lebih mudah memahami serta menjalankan program dengan teratur sesuai dengan harapan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan untuk mengungkap lebih lanjut tentang bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan lahan pesisir pantai terhadap adanya wisata bahari yang ada. Sehingga hal ini dapat menjadi penunjang untuk memberdayakan masyarakat setempat supaya dalam mengelola wisata bahari ini dapat berjalan dengan sesuai prosedur yang ada.

B. Penegasan Istilah

1. Pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep peningkatan ekonomi yang mencakup aspek masyarakat untuk menciptakan perspektif dalam pembangunan yang berbasis *people-centered, participatory*. Memberdayakan masyarakat adalah suatu cara dalam memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat kelas bawah (*grass root*) dengan berbagai keterbatasannya yang masih kesulitan keluar dari garis kemiskinan, gagap pengetahuan dan background yang kurang, sehingga peran pemberdayaan masyarakat sangat penting dalam mengembangkan lembaga-lembaga sosial yang ada. Menumbuhkan era budaya modern seperti kerja keras, hemat, transparansi, tanggung jawab yang menjadi icon utama dalam metode pemberdayaan.

2. Pengelolaan Lahan Pesisir

Pengelolaan Lahan Pesisir adalah upaya untuk mengatur sumber daya alam yang terdapat pada sekitar pesisir dan lautan secara berkelanjutan supaya bisa memberikan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan yang optimal bagi masyarakat. Pengelolaan wilayah pesisir juga dapat diartikan sebagai salah satu upaya perencanaan, pengoptimalan, pendampingan, dan

penguasaan ekosistem pesisir oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dengan sumber daya darat dan laut, dan antara ilmu pengetahuan serta tata kelola dalam meningkatkan kemakmuran masyarakat. Wilayah pesisir merupakan zona transisi darat dan laut. Ekosistem yang dipengaruhi oleh perubahan daratan dan lautan.

Pemanfaatan lahan pesisir meliputi berbagai aspek seperti pemanfaatan sumber daya alam secara optimal serta pengendalian lahan pesisir kerusakan lingkungan, pengelolaan pariwisata, dan pengelolaan resiko terhadap bencana. Dalam hal ini, pengelolaan lahan pesisir perlu diperhatikan secara berulang atau berkelanjutan serta seimbang antara penggunaan sumber daya alam dengan kebutuhan masyarakat lingkungan. Langkah pengelolaan yang baik akan memberikan pemanfaatan bersifat *continue* dan pengelolaan sumber daya alam yang bernuansa lingkungan, serta pengendalian terhadap resiko bencana dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

3. Kelompok Sadar Wisata

Kelompok Sadar Wisata dibentuk atas penduduk yang mempunyai kesadaran tinggi mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan serta budaya di daerah wisata serta ikut berpartisipasi dalam mengembangkan potensi wisata secara berkelanjutan. Kelompok ini terdiri dari warga lokal, pihak pariwisata dan pemerintah setempat yang bekerja sama dalam upaya mengembangkan serta branding wisata di daerahnya.

Kelompok ini bertujuan untuk menciptakan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan hidup serta nilai-nilai sosial dalam kegiatan pariwisata. Mereka juga membantu upaya dalam mengembangkan destinasi wisata yang *continue*. Yang nantinya dapat memberikan pemanfaatan terhadap masyarakat, khususnya pada sektor ekonomi, sosial dan lingkungan.

Menurut pendapat Munasef dalam Hadiwijoyo, pengembangan pariwisata oleh kelompok sadar wisata merupakan suatu kegiatan dan cara yang terpadu untuk memberikan daya tarik wisatawan, memberikan

fasilitas yang memadai, barang dan jasa, untuk memberikan pelayanan baik terhadap kebutuhan wisatawan.⁷ Dengan adanya Kelompok Sadar Wisata atau bisa disebut Pokdarwis dalam konteks pengembangan wisata telah ikut berpartisipasi sebagai salah satu pihak yang utama dalam upaya terwujudnya lingkungan serta suasana yang nyaman dan kondusif yang berada pada kelas daerah. Yang secara kelembagaan memberikan efek positif bagi pengembangan pariwisata di unsur regional universal. Peran Pokdarwis sendiri dalam upaya pengembangan destinasi wisata di daerahnya dengan kegiatan yang dapat menggerakkan masyarakat.⁸

C. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan suatu masalah yaitu Bagaimana Proses dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Lahan Pesisir Pantai oleh Kelompok Sadar Wisata Di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan dari masalah diatas tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk memberdayakan masyarakat supaya dapat mengelola lahan dengan benar dan memanfaatkan potensi desa yang ada melalui peran kelompok sadar wisata.

E. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan gambaran mengenai pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh masyarakat melalui pengelolaan lahan pesisir pantai untuk pengembangan ekowisata bahari di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen.

⁷ Outari Diah P et.al., *Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus* (2020), hal. 78.

⁸ Firmansyah Rahim, *Pedoman Kelompok Sadar Wisata*, (2019) hal. 8.

- b. Menambah wawasan keilmuan dibidang pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lahan pesisir pantai dan ekowisata bahari.

2. Manfaat Praktis

a. Lembaga

Digunakan sebagai pedoman untuk pengelolaan lahan pesisir pantai dan juga objek wisata Pantai Laguna Lembupurwo supaya terwujudnya pengembangan masyarakat bisa lebih optimal.

b. Masyarakat

Dapat memberikan wawasan serta pengetahuan mengenai pemanfaatan dan pengelolaan lahan pesisir pantai serta pelestarian agar dapat menunjang perekonomian masyarakat.

c. Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta mengamalkan terhadap apa yang telah di terima selama penelitian berlangsung dengan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan.

d. Pembaca

Untuk menambah wawasan kepada para pembaca khususnya tentang pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir dalam mengelola lahan pesisir pantai melalui pengembangan ekowisata bahari.

F. Tinjauan Pustaka

Pertama, Jurnal penelitian yang berjudul “Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara” yang ditulis oleh Ayu Asari, Boyke H Toloh, dan Joudy R.R Sangari. Penelitian ini membahas tentang permasalahan manajemen apakah pengelolaan ekowisata bahari sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata yang sebenarnya. Memberikan wawasan tentang status pengembangan ekowisata di desa Bahoi dan menganalisis aspek-aspek serta konsep ekowisata dengan melalui metode deskripsi kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini masih dari problem tentang pelestarian destinasi wisata yang bernuansa alam di Desa Bahoi yang masih simpang siur, target

ekowisata yang belum tercapai terutama pada sektor ekonomi, serta masih minimnya partisipasi pemberdayaan masyarakat.⁹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai strategi atau manajemen pengelolaan lahan di daerah pesisir pantai. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian ini lebih menekankan pada prinsip untuk mengembangkan ekowisata bahari, sedangkan penelitian penulis menekankan pada strategi pengelolaan lahan pesisir pantai yang digunakan untuk mensejahterakan masyarakat sekitar pantai.

Kedua, jurnal penelitian yang berjudul “Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Keanekaragaman Hayati Pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pengundang Bintang Mangrove di Desa Pengundang Kabupaten Bintang” yang di tulis oleh Henky Irawan dan Tengku Said Raaza’i. Penelitian ini membahas permasalahan tentang cara *mempublish* dan menciptakan rasa kepedulian pada lingkungan sekitar pesisir terhadap para wisatawan apabila mereka berkunjung ke Desa Pengundang. Serta bagaimana upaya dalam mengarahkan minat wisatawan menuju kearah ekowisata bahari berbasis keanekaragaman hayati. Penelitian ini membahas mengenai pelestarian wisata berbasis keanekaragaman hayati yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) serta untuk memberikan pengarahan kepada para wisatawan yang berkunjung ke Desa Pengundang. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu daya tarik akan keanekaragaman hayati menjadi meningkat karena banyak ditemukan biota laut sehingga membuat para wisatawan memiliki rasa keingintahuan tinggi, tetapi belum sepenuhnya menyadari betapa pentingnya menjaga ekowisata yang ada.¹⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama melibatkan Kelompok Sadar Wisata untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengembangan ekowisata bahari berupa lahan pesisir pantai. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian diatas

⁹ Ayu Asari et.al., *Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Masyarakat di Desa Bahoi, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara* (2018), hal. 29-30.

¹⁰Henky Irawan dan Tengku Said R, *Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Keanekaragaman Hayati Pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pengundang Bintang Mangrove di Desa Pengundang Kabupaten Bintang* (2018), hal. 1.

menekankan pada proses pengembangan ekowisata bahari dengan cara memberikan daya tarik tersendiri untuk para wisatawan untuk berkunjung ke wisata tersebut, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai bagaimana strategi yang tepat untuk digunakan masyarakat dalam proses pemanfaatan lahan pesisir pantai.

Ketiga, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Sumberdaya Pesisir untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pantai Binangun, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah” yang ditulis oleh Bunga Pragawati. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah minimnya partisipasi pemerintah daerah setempat yang menjadikan Pantai Binangun belum memiliki jangkauan luas serta pemanfaatan sumber daya yang minim dalam upaya meninjau proses kelestariannya sehingga dapat menyebabkan penurunan kondisi lingkungan. Penelitian ini membahas tentang apa saja potensi dan kondisi pesisir yang dimiliki oleh Binangun, selain itu juga mengupayakan strategi alternatif yang digunakan dalam pengelolaan ekowisata bahari dan kondisi lingkup pengelolaan daerah Binangun. Penelitian ini menggunakan metode analisis kesesuaian lahan untuk mengetahui macam-macam wisata yang nantinya dapat dikembangkan, faktor pendorong yang dianalisis untuk mengetahui banyaknya wisatawan yang berkunjung yang dapat disesuaikan secara fisik dalam jangka waktu tertentu tanpa merusak sumber daya yang tersedia, serta analisis SWOT guna menentukan prioritas cara pembangunan alternatif yang paling tepat.¹¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas permasalahan mengenai kurangnya pemanfaatan lahan atau sumberdaya pantai, serta kurangnya partisipasi dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih membahas mengenai pengembangan wisata atau penambahan kembali lahan wisata di daerah tersebut, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap strategi pengelolaan lahan atau sumberdaya pesisir yang ada supaya dapat mensejahterakan masyarakat setempat.

¹¹ Bunga Pragawati, *Pengelolaan Sumberdaya Pesisir untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pantai Binangun, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah* (2009), hal. 1.

Keempat, penelitian yang berjudul “Pengembangan Masyarakat Pesisir Dalam Upaya Mengembangkan Pariwisata Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Gili Gede Sekotong Kabupaten Lombok Barat” yang ditulis oleh Masrun, Akhmad Jupri, dan M. Firmansyah. Penelitian ini membahas tentang pengembangan destinasi wisata dengan tujuan pemberdayaan masyarakat pesisir melalui usaha kecil mikro untuk meningkatkan pengetahuan serta perekonomian masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun Program pemberdayaan masyarakat pesisir sebagai bagian dari pengembangan pariwisata di wilayah pantai dengan harapan masyarakat ikut berpartisipasi didalamnya. Hasil penelitian ini adalah adanya pendampingan serta pelatihan guna memecahkan suatu permasalahan sebagai salah satu tujuan dari pemberdayaan masyarakat, kemudian ditinjau dari sektor ekonomi hal ini menguntungkan masyarakat karena mereka merasa terbantu adanya destinasi wisata Pantai Gili.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas tentang strategi pemanfaatan lahan disekitar pantai. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian tersebut berfokus pada pengelolaan sumberdaya didesa, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan lahan yang nantinya dijadikan sebagai metode untuk mensejahterakan masyarakatnya.

Kelima, penelitian skripsi yang berjudul “Dampak Pengembangan Ekowisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Ekowisata Bahari Pulau Mansuar Kabupaten Raja Ampat)” yang ditulis oleh Muhiddin Tafalas. Penelitian ini membahas mengenai permasalahan sosial yang membuat tingkat pariwisata bahari ini belum optimal. Tujuan penelitian ini tidak lain adalah untuk memaparkan kondisi awal kawasan Meos Mansaari sebelum berdirinya kegiatan ekowisata ini serta menganalisis dampak sosial dan ekonomi yang dialami masyarakat setempat. Adapun hasil penelitian ini yaitu perlautan Kabupaten Raja Ampat merupakan salah satu terumbu karang terbaik di Indonesia. Kekayaan ekosistem laut merupakan

¹² Masrun et.al., *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Gili Gede Sekotong Kabupaten Lombok Barat* (2019), hal. 32.

potensi yang dapat dikembangkan sebagai ekowisata bahari. Pulau Mansuar di Meos Mansaari adalah salah satu contoh pulau Raja Ampat yang dikelola oleh ekowisata bahari.¹³

Keenam, jurnal yang berjudul “Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat” yang oleh Usman Made dan Madinawati. Tujuan penelitian ini adalah membantu masyarakat meningkatkan pendapatan usaha tani untuk menanam sayuran organik guna memenuhi pangan dan nilai gizi serta meningkatkan perekonomian. Adapun hasil penelitian, warga Kecamatan Banawa berhasil mengerjakan berbagai program pengembangan masyarakat di bidang pupuk dan organik penambahan program kerja yang bertujuan supaya masyarakat mampu ikut serta dalam hal ini.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui pengelolaan lahan pesisir. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian diatas lebih menekankan pada objek pertanian yang meliputi sayur sayuran, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengembangan pada bidang ekowisata di wilayah pesisir pantai.

Dari keenam penelitian diatas, peelitian yang pembahasannya mendekati penelitian penulis adalah penelitian milik Bunga Pragawati Tahun 2009, “Pengelolaan Sumberdaya Pesisir untuk Pengembangan Ekowisata Bahari di Pantai Binangun, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.” Persamaan penelitian milik Bunga Pragawati dengan penelitian saya adalah menganalisis mengenai strategi pengelolaan lahan untuk pengembangan ekowisata serta peningkatan ekonomi masyarakat. Adapun perbedaan dengan penelitian saya adalah penelitian yang saya gunakan membahas mengenai strategi pengelolaan lahan pesisir pantai oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis).

¹³ Muhiddin T, *Dampak Pengembangan Ekowisata terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Ekowisata Bahari Pulau Mansuar Kabupaten Raja Ampat*, 12.

¹⁴ Usman Made dan Madinawati, *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat*, 14.

Pada penelitian ini, penulis hanya memfokuskan penerapan satu metode saja, ialah pendekatan kualitatif. Maka, penelitian ini bukanlah penelitian lanjutan, melainkan penelitian baru. Meskipun studi serupa yang dijelaskan di atas digunakan sebagai pembandingan. Hal ini karena perkembangan wisata bahari tidak seperti satu tempat ke tempat lain.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah kaidah penulisan skripsi yang digunakan untuk mempermudah dalam memahaminya. Guna memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memberikan gambaran serta pemahaman pada penelitian yang akan saya teliti. Berikut saya paparkan sistematika penulisannya, diantaranya :

BAB I PENDAHULUAN : yang berisi latar belakang masalah, penjelasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori dan juga sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI : bab ini memuat tentang teori yang digunakan penulis, yaitu mengenai Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Lahan Pesisir di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Banyumas.

BAB III METODE PENELITIAN : berisi metode penelitian diantaranya jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN : berisi penyajian data serta pembahasan data yang meliputi Proses Pemberdayaan Masyarakat dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Lahan Pesisir Pantai di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Banyumas.

BAB V PENUTUP : penutup yang berisikan simpulan dan saran.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok / organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya / kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerful*) sehingga terjadi keseimbangan. Begitu pula menurut Rappaport, pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya.¹⁵

Pemberdayaan Masyarakat merupakan sebuah proses pembentukan masyarakat supaya dapat berinisiatif dalam melakukan kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.¹⁶ Dapat dikatakan pemberdayaan masyarakat apabila masyarakat tersebut yang menjadi aktor dalam pembangunan atau aktor partisipasi. Pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk mendayagunakan dan memampukan potensi yang dimiliki

¹⁵ Dwi Iriani Margayaningsih, *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa* (2018), hal. 77.

¹⁶ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan., *Pemberdayaan Masyarakat* (2019), hal. 8.

masyarakat desa memberikan nilai positif bagi kesejahteraan dan taraf hidup sosial ekonomi masyarakat.¹⁷

Menurut PBB bahwasanya Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu proses partisipasi aktif dari masyarakat yang merancang terwujudnya peningkatan di bidang ekonomi dan sosial serta menanamkan jiwa inisiatif pada masyarakat.¹⁸ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya pengembangan masyarakat dilakukan dengan proses pengelolaan sumber daya alam, lingkungan juga pembangunan infrastruktur yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat serta tingkat kesejahteraan masyarakat.¹⁹

Menurut Suharto, pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam : 1. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan dan kesakitan. 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan masyarakat dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dan berkualitas 3. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka.²⁰

Para ahli mengatakan bahwa partisipasi atau peran masyarakat pada hakekatnya adalah dari sikap dan perilaku namun batasannya tidak jelas, akan tetapi mudah dirasakan, dihayati dan diamalkan namun sulit untuk dirumuskan.²¹

Menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto menyampaikan bahwa terdapat tiga tahapan dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan

¹⁷ Kiki Endah, *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa* (2020), hal. 140.

¹⁸ Surya Dewi, *Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Putih dalam Pengelolaan Sampah* (2020), hal. 37.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Desa*.

²⁰ Hendrawati Hamid, *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (2018), hal. 11.

²¹ Dwi Iriani Margayaningsih, *Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa* (2018), hal. 76.

masyarakat yaitu: 1) penyadaran, pada tahap ini masyarakat yang menjadi subjek pemberdayaan diberi penyadaran bahwa setiap manusia mempunyai potensi yang dapat dikembangkan. 2) pengkapasitasan, pada tahap ini dapat dicapai jika masyarakat telah memiliki kemampuan untuk menerima kekuatan. Tahap ini sering juga disebut dengan *capacity building* yang meliputi manusia, organisasi, dan sistem nilai dan. 3) pendayaan, pada tahap ketiga ini masyarakat diberikan daya, otoritas, atau peluang untuk berkembang mencapai kemandirian. Pemberian daya disesuaikan dengan kualitas kecakapan masing-masing individu.²²

Menurut Sumaryadi tujuan pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosio ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.²³

Menurut Suharto terdapat indikator pemberdayaan yaitu kegiatan yang terstruktur dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilaksanakan melalui program peningkatan kapasitas. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki arti yaitu : dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan terhadap peningkatan kemampuan individu atau masyarakat untuk mewujudkan suatu kemandirian. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya.²⁴

²² Kiki Endah, *Pemberdayaan Masyarakat : Menggali Potensi Lokal Desa* (2020), hal. 138.

²³ Chandra Kusuma et. al., “*Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi pada Desa Wonorejo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang)*” (2018), hal. 1205.

²⁴ Dwi Iriani Margayaningsih, “*Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa*” (2018), hal. 78.

Dengan adanya indikator pemberdayaan tersebut, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan atau keberhasilan pemberdayaan tersebut. Adapun tujuan adanya peran masyarakat yaitu 1. Meningkatkan peran serta kemandirian, dan kerjasama dengan lembaga lembaga non pemerintah yang memiliki visi yang sesuai 2. Meningkatkan kuantitas kolaborasi kelembagaan dan organisasi non pemerintah dan masyarakat 3. Memperkuat partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap proses pembangunan melalui peningkatan jaringan jejaring dengan masyarakat.²⁵

Oleh karena itu terdapat tiga karakteristik umum dari program pemberdayaan masyarakat sendiri, diantaranya :

- a. *Community base*, dimana disini masyarakat berperan sebagai subjek pengembangan suatu program. Dengan begitu masyarakat akan menjadi berkembang baik itu pola pikir maupun dalam *public speaking*.
- b. *Local resources base*, pembentukan suatu aktivitas dengan memperhatikan peluang sumber daya alam yang tersedia. Maksud disini adalah supaya program yang dibentuk dapat relevan dengan kondisi pada wilayah pembangunan.
- c. *Sustainable*, pembangunan berkelanjutan yang menjadi faktor pendorong utama dalam kesuksesan suatu program. Perlu adanya *to be continue* agar program tidak berhenti ditengah jalan.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 bahwasanya Program Pembangunan Desa dan Kelurahan.²⁶ Pembangunan yang dimaksud disini adalah pembangunan yang Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan kota. Masyarakat diharapkan ikut andil dalam pembangunan desa demi terwujudnya tujuan bersama yaitu pengembangan masyarakat (*Community Development*). Masyarakat disini tidak hanya ikut berpartisipasi dalam hal tenaga, tapi masyarakat juga boleh atau bebas

²⁵ Dwi Iriani Margayaningsih, "*Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Des*"a (2018), hal. 77.

²⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, *Program Pembangunan Desa dan Kelurahan*.

menyampaikan pendapat serta aspirasi mereka kepada pemerintah atau pimpinan.

Relevansi pengembangan masyarakat (community development) terhadap pengelolaan lahan pesisir pantai yaitu tingkat partisipasi aktif masyarakat yang nantinya akan menjadi faktor penting terwujudnya pengembangan Masyarakat desa secara ekonomi, sosial dan ekologis. Dengan begitu, tingkat kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

2. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut beberapa ahli, jika suatu pemberdayaan ingin mencapai keberhasilan maka perlu memperhatikan prinsip-prinsipnya.²⁷ Diantaranya yaitu :

- a. Partisipasi Aktif, dalam hal ini masyarakat wajib ikut terlibat pada keseluruhan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi program pemberdayaan.
- b. Kesetaraan dan Keadilan, dalam prinsip ini mengormati hak asasi manusia sangat diperkuat. Atau dengan kata lain semua individu memiliki hak yang sama dalam mengakses sumber daya dan *benefit* dari adanya program pemberdayaan.
- c. Berbasis pada Kebutuhan dan Potensi Lokal, pada prinsip ini jika akan mengadakan program pemberdayaan harus dirancang dengan memperhatikan karakteristik yang unik dan potensi masyarakat lokal.
- d. Kemitraan dan Kerjasama, dalam hal ini pemberdayaan masyarakat kerap melakukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, LSM, dan sektor wisata. Dengan tujuan dapat memperluas jangkauan sumberdaya dan *support* untuk masyarakat. Selain itu dengan adanya kerjasama atau kolaborasi dapat menjadikan pemberdayaan masyarakat lebih dekat dengan klien.
- e. Evaluasi dan follow up, dalam prinsip ini program pemberdayaan harus dilakukan evaluasi secara berkala untuk menilai dampaknya dan

²⁷ Dedeh Maryani dan Ruth Roselin E. Nainggolan., *Pemberdayaan Masyarakat* (2019), hal. 8.

memastikan penyesuaian dengan yang dibutuhkan. Selain itu, follow up ini juga nantinya berguna untuk perkembangan masyarakat sendiri. Dalam hal ini masyarakat juga mampu memberikan perubahan yang bersistem kelanjutan. Dengan begitu program ini wajib diintegrasikan dengan kebijakan inisiatif yang memiliki jangkauan luas.

- f. Fokus pada Hasil, salah satu tujuan diadakannya suatu program yaitu dengan mencapai hasil yang baik. Hal itu sama dengan program pemberdayaan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang nyata atau konkret. Seperti peningkatan kesejahteraan, akses ke layanan dasar serta perubahan sosial positif.
- g. Fasilitasi Sumber Daya, dalam prinsip ini dijelaskan bahwa masyarakat diwajibkan memiliki akses terhadap sumber daya, seperti sumber daya finansial, teknis atau sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan pemberdayaan itu sendiri.

Tidak cukup hanya memperhatikan prinsip saja, menurut Al-Qur'an terdapat beberapa langkah yang membuat suatu pemberdayaan tersebut berhasil. Diantaranya yaitu pengembangan diri yang berkesinambungan. Artinya masyarakat yang menjadi pelaku program ini dituntut untuk mempunyai kemampuan mengembangkan diri supaya dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat tersebut. Kemudian berikutnya yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai pengasahan skill dan ketrampilan yang mereka miliki.

Ketiga yaitu mengedepankan berbagi atau membiasakan zakat dan infaq. Hal ini merupakan cara ampuh dalam mengangkat masyarakat dalam lingkup kemiskinan. Selain itu mereka juga diwajibkan dalam pengelolaan zakat yang lebih efisien dan profesional demi mewujudkan program pemberdayaan yang lebih efektif. Dan langkah terakhir yaitu masyarakat dituntut untuk menjauhi perilaku ekonomi yang tidak dianjurkan dalam agama islam seperti penimbunan bahan pokok (*hoarding*) dan monopoli

(*ihtikar*). Karena hal tersebut membuat masyarakat yang lain rugi dan melenceng pada ajaran islam yang mengedepankan semangat keadilan.²⁸

3. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Upaya memberdayakan masyarakat dilakukan dengan mendudukan masyarakat sebagai aktor utama juga harus didukung dengan bantuan ekonomi serta membekali dengan berbagai ketrampilan dan pengetahuan. Wawasan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki akan meningkatkan kreativitas yang akan membantu dalam pengambilan keputusan, melihat dan memanfaatkan peluang serta mengatasi kendala yang timbul dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hasil yang diperoleh juga akan lebih baik.²⁹

Menurut Ismawan dalam Mardikanto dan Soebianto bahwasanya terdapat lima strategi pemberdayaan yaitu :³⁰

- a. Pengembangan sumber daya manusia, dalam mengembangkan SDM diperlukan fasilitas yang memadai kepada masyarakat, seperti pelatihan skill, dan perluasan wawasan.
- b. Pengembangan kelembagaan kelompok, dalam program ini perlu adanya pendampingan dari fasilitator secara langsung kepada masyarakat, seperti melakukan legalitas kelompok atau produk usaha.
- c. Pemupukan modal masyarakat (swasta), pada program ini masyarakat dapat diberikan modal terlebih dulu untuk membuka usaha yang nantinya dapat menunjang ataupun menstabilkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya diberikan bantuan dana saja tetapi perlu adanya bantuan fasilitas dan sarana prasarana.
- d. Pengembangan usaha produktif, dalam mencapai usaha yang produktif perlu adanya pendampingan dari beberapa pihak yang sudah paham mengenai pengembangan usaha, seperti halnya pemerintah. Dalam hal

²⁸ Ulfi Putra S, “Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Qur’an” (2019), 43.

²⁹ Siti Zuliyah, “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menunjang Pembangunan Daerah” (2020), 153.

³⁰ Iin Sarinah, dkk, “Pemberdayaan Masyarakat dalam Bidang Ekonomi oleh Pemerintah Desa Pangandaran, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran” (2019), hal. 271.

itu pemerintah diharapkan mampu melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya.

- e. Penyediaan informasi tepat guna, dalam program ini juga sama pentingnya dengan keempat program diatas. Dimana jika masyarakat mengalami kesulitan informasi, mereka dapat diberikan arahan dan solusi mengenai permasalahan tersebut.

4. Faktor Penghambat

Pemberdayaan masyarakat ini dapat menghadapi berbagai faktor penghambat yang dapat mempengaruhi upaya untuk meningkatkan partisipasi dan peran kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Berikut adalah beberapa faktor penghambat pemberdayaan masyarakat :

- a. Ketidakadilan Sosial dan Ekonomi

Ketimpangan tersebut dapat menjadi penghalang yang utama dalam pemberdayaan masyarakat. Ketidaksetaraan akses terhadap sumberdaya, layanan, pendidikan, dan peluang ekonomi dapat menyulitkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dan meraih kemandirian.

- b. Kurangnya Pendidikan dan Keterampilan

Kekurangan yang relevan tersebut dapat menjadi penghambat dalam pemberdayaan masyarakat, karena tanpa adanya pengetahuan dan keterampilan yang memadai, masyarakat mungkin akan kesulitan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kondisi hidup mereka sendiri.

- c. Rendahnya Kesadaran Diri dan Partisipasi

Kurangnya kesadaran atas hak-hak dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka sendiri dapat membatasi pemberdayaan. Apabila masyarakat tidak terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, mereka mungkin tidak merasa memiliki kendali akan kesejahteraan masyarakat.

d. Minimnya Norma dan Budaya

Norma-norma sosial dan budaya yang membatasi peran dan kemampuan masyarakat, terutama dalam gender dan kedudukan. Hal tersebut dapat menjadi penghambat dalam keberhasilan dalam pemberdayaan. Karena ketidaksetaraan gender, diskriminasi kasta, atau stereotip gender yang kuat dapat menghalangi partisipasi penuh masyarakat dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

e. Kurangnya Akses terhadap Sumber Daya

Ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya seperti lahan, air bersih, rumah yang layak, serta berbagai layanan lainnya. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap sumber daya tersebut, mereka sulit untuk meningkatkan kondisi hidup masyarakat itu sendiri.

f. Kurangnya Dukungan Kelembagaan

Keberhasilan dari suatu pemberdayaan masyarakat juga sangat bergantung pada dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor wisata. Kurangnya kelembagaan yang kuat dan dukungan yang konsisten dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk mengambil inisiatif dan melaksanakan proyek-proyek pemberdayaan.

g. Konflik dan Kestabilan Politik

Ketidakstabilan politik dan situasi keamanan yang tidak kondusif dapat menghalangi upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam situasi-situasi seperti ini, masyarakat mungkin tidak memiliki keamanan atau stabilitas yang diperlukan untuk melibatkan aktivitas pemberdayaan.

h. Kurangnya Akses terhadap Informasi dan Teknologi

Dengan kurangnya informasi dan teknologi seperti internet dan sosial media, dapat menghalangi pemberdayaan di era digital. Jika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan teknologi, mereka mungkin terpinggirkan dari kesempatan dan sumber

daya yang ditawarkan oleh dunia yang semakin terhubung secara global.

5. Faktor Pendorong Pemberdayaan Masyarakat

Setelah mengetahui faktor yang menghambat adanya pemberdayaan masyarakat, maka berikut ini terdapat beberapa poin tentang faktor yang mendorong suatu pemberdayaan masyarakat, yakni :

a. Kesadaran akan hak-hak dan kewajiban

Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka serta kewajiban yang melekat pada masyarakat sendiri adalah faktor penting dalam pemberdayaan. Ketika masyarakat menyadari hak-hak mereka, mereka dapat mengambil inisiatif untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri dan mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

b. Pendidikan dan Ketrampilan

Dengan adanya pendidikan yang berkualitas dan ketrampilan yang relevan, merupakan faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat. Pendidikan yang memadai membantu masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang luas, ketrampilan, dan pemahaman yang diperlukan untuk partisipasi dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan politik.

c. Akses terhadap Sumber Daya

Akses yang adil dan setara dengan sumber daya seperti lahan, air bersih, perumahan, layanan kesehatan, dan pendidikan merupakan faktor penting dalam pemberdayaan masyarakat. Jika masyarakat sendiri memilih akses yang memadai terhadap sumber daya ini, mereka dapat menggunakan dan mengelola sumber daya tersebut secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

d. Partisipasi Aktif dalam Pengambilan Keputusan

Keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka yaitu faktor penting dalam pemberdayaan. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang

berhubungan dengan keputusan mereka, mereka merasa memiliki kendali atas masa depan mereka sendiri dan dapat berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang diinginkan.

e. Dukungan dari Kelembagaan

Dukungan yang kuat dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta merupakan faktor utama dalam pemberdayaan masyarakat. Kelembagaan yang mendukung memberikan akses ke sumber daya, pelatihan, modal, dan jaringan yang dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki serta melaksanakan proyek-proyek pemberdayaan.

f. Kesetaraan Gender

Menciptakan kesetaraan gender merupakan faktor pendorong utama dalam pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik tidak hanya menguntungkan perempuan itu sendiri, tetapi juga menghasilkan manfaat yang luas bagi masyarakat secara keseluruhan.

B. Partisipasi

1. Pengertian Partisipasi

Menurut Mubyarto bahwasanya partisipasi merupakan upaya kesiapan dalam membantu kesuksesan suatu program sesuai dengan potensi yang dimiliki masing-masing orang dengan tidak mengorbankan diri sendiri.³¹ Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwasanya, “Masyarakat desa diminta untuk memberikan partisipasinya secara aktif dalam upaya pengambilan keputusan dan pelaksanaan pembangunan di desa.” Menurut Arimbi bahwasanya partisipasi di artikan sebagai *feed-forward information and feedback information*.³²

Dalam hal ini peran masyarakat merupakan komunikasi antara pihak pemerintah yang berperan sebagai pemegang kekuasaan dan juga

³¹ Laily, Elida Imroatin et.al., *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif* (2018), hal. 300.

³² Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Desa*.

masyarakat yang berperan sebagai penerima dampak kebijakan secara langsung yang mereka rasakan.³³ Partisipasi masyarakat diharapkan mampu menjadi faktor utama terwujudnya pengembangan desa wisata, dalam konteks ini masyarakat diminta supaya melakukan pengembangan desa dengan mengelola sumber daya alam yang sudah tersedia.

Menurut Conyers bahwasanya partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam kegiatan dan perencanaan pembangunan desa.³⁴ Terdapat tiga alasan penting mengenai pentingnya partisipasi masyarakat dalam upaya pembangunan desa, diantaranya :

- a. Masyarakat adalah subjek yang digunakan untuk menerima informasi tentang situasi dan kondisi, kebutuhan dan perilaku masyarakat setempat.
- b. Masyarakat sebagai informan yang mengetahui sejarah program kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, pentingnya melibatkan masyarakat dalam program tersebut yang disisi lain juga supaya dapat memberikan rasa percaya kepada masyarakat.
- c. Menjadi faktor pendorong partisipasi umum yang merupakan hak masyarakat demokrasi dalam bidang partisipasi masyarakat.

C. Desa Wisata

1. Pengertian Desa Wisata

Hadiwijoyo mengartikan desa wisata sebagai suatu bagian pedesaan yang memamerkan keseluruhan suasana yang mencerminkan ke asrian pedesaan baik dari segi kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, maupun kegiatan perekonomian yang khas dan menarik serta memiliki potensi untuk dikembangkan dengan

³³ Laily, Elida Imroatin et.al., *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif* (2018), hal. 300.

³⁴ Wirawan R et.al., *Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah* (2015) hal. 302.

berbagai komponen kepariwisataan, misalnya pertunjukan, akomodasi, makanan-minuman khas dan kebutuhan wisata lainnya.³⁵

Menurut Prof. Hunziker dan Prof. K. Krapt dalam Yoeti menyampaikan bahwasanya pariwisata merupakan keseluruhan dan fenomena yang muncul dari perjalanan dan ketetapan orang asing asalkan tidak berarti dibentuknya penduduk lokal.³⁶

Desa wisata merupakan sebuah bagian pedesaan yang memiliki beberapa ciri khusus untuk menjadi wilayah tujuan wisata.³⁷ Desa wisata merupakan suatu desa yang memiliki keindahan dengan sebagai ciri khas desanya, dilihat dari bidang sosial budayanya, adat istiadatnya, serta mempunyai komponen pariwisata sebagai potensi desa tersebut, seperti adat nya yang unik, ciri khas makan dan minumannya, serta keasrian atau pemandangan pedesaannya.

Desa wisata sendiri memiliki dua komponen yaitu: pertama, akomodasi, yakni sebagian dari tempat tinggal penduduk setempat dan atau/unitunit yang berkembang sesuai dengan tempat tinggal penduduk, dan kedua, atraksi, yakni seluruh kehidupan sehari-hari penduduk setempat beserta latar fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipan aktif.³⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang Desa.³⁹ Undang-Undang ini relevan dengan pasal 18 B ayat 2 dan juga Pasal 18 ayat 7 dimana menjadi poin penting mengenai peraturan desa di Indonesia. Setelah di berlakukannya Undang-Undang ini struktur desa sebagai *self-governing community* dan *local self-government*. Dengan begitu diharapkan dapat menjadi acuan infrastruktur

³⁵ Dinar Wahyuni, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul* (2018), hal. 88.

³⁶ Arismayanti, N. K, *Pariwisata Hijau sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia* (2015), hal. 5.

³⁷ Dinar Wahyuni, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul* (2018), hal. 88.

³⁸ Dinar Wahyuni, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul* (2018), hal. 88.

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Desa*.

masyarakat mengenai pengaturan desa.⁴⁰ Undang-Undang ini memberikan ketetapan hukum dalam mengembangkan desa wisata sebagai bentuk peningkatan ekonomi masyarakat desa serta melestarikan kebudayaan lokal.

2. Unsur-Unsur Desa Wisata

Dalam Undang-Undang tentang Desa mengemukakan poin penting berupa unsur-unsur mengenai Desa Wisata, diantaranya:

- a. Pembentukan desa wisata, yang dapat dilakukan melalui inisiatif masyarakat atau pemerintah desa. Partisipasi masyarakat wajib dilibatkan dalam proses ini. Selain itu juga harus memperhatikan konservasi lingkungan dan kelestarian budaya.
- b. Pengembangan desa wisata, dalam upaya pengembangan desa wajib memperhatikan segi ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Dalam mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendorongadanya wisata serta promosi wisata, diharapkan adanya kerjasama antara masyarakat dan pemerintah daerah.
- c. Perlindungan lingkungan dan kebudayaan, dalam melakukan upaya pengembangan desa wisata perlu dilakukan secara *continue* dan pentingnya memperhatikan konservasi lingkungan serta kelestarian alam dan budaya pedesaan. Dalam hal tersebut tak luput dari peran pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukannya.
- d. Pendanaan desa wisata, dana disini bisa diperoleh dari pemerintah, iuran masyarakat maupun sektor swasta. Disini juga peran pemerintah daerah dan desa harus bergotong royong atau bahu membahu dalam upaya pendanaan desa wisata tersebut.
- e. Pengawasan dan evaluasi, dalam hal ini merupakan tanggungjawab wewenang dari pemerintah daerah. Demi terwujudnya keberhasilan

⁴⁰ Arismayanti, N. K, *Pariwisata Hijau sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia* (2015) hal. 6.

pengembangan desa wisata perlu diadakannya evaluasi berkala yang dilakukan secara *to be continue* serta dalam mengidentifikasi masalah yang perlu diatasi.

3. Kategori Desa Wisata

Suatu desa dapat dikatakan sebagai desa wisata jika memiliki kategori sebagai berikut :⁴¹

- a. Memiliki potensi produk atau daya tarik yang unik dan khas sehingga mampu dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Potensi-potensi tersebut dapat berupa lingkungan alam maupun kehidupan sosial budayanya.
- b. Memiliki ketersediaan sumber daya manusia (SDM) lokal yang cukup dan memadai untuk mendukung pengelolaan desa wisata.
- c. Faktor peluang akses terhadap akses pasar. Faktor ini memegang peran utama, karena suatu desa yang telah memiliki kesiapan untuk dikembangkan sebagai desa wisata tidak berarti jika tidak mempunyai akses untuk berelasi dengan pasar atau wisatawan.
- d. Potensi SDM lokal yang mendukung peluang akses terhadap pasar wisatawan.
- e. Memiliki area untuk pengembangan fasilitas pendukung desa wisata, seperti: home stay, area pelayanan umum, area kesenian dan sebagainya.

Jika suatu desa sudah memenuhi kategori tersebut, maka desa tersebut dapat dikatakan desa wisata. Dengan poin penting desa tersebut mampu mengemas dan mengembangkan wisata tersebut dengan baik.

⁴¹ Dinar Wahyuni, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul* (2018), hal. 88.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dalam hal ini, peneliti melakukan langkah terhadap subjek penelitian adalah memmanifestasikan arti dari pemberdayaan masyarakat. Yaitu upaya pemberdayaan terhadap masyarakat oleh Kelompok Sadar Wisata melalui pengelolaan lahan pesisir Pantai Lembupurwo. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode lingkungan alam atau biologis, sumber informasi langsungnya adalah manusia perangkat penting dalam teknik akumulasi atau pengumpulan data, menganalisis data dilakukan secara outentik dan lebih mengutamakan langkah dari pada hasil. Oleh karena itu, penulis menggunakan model penelitian lapangan (*field research*).

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan bertempat di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai pada bulan Maret sampai Agustus 2023.

C. Subjek dan Objek

Subjek Penelitian merupakan informan penelitian atau yang berkaitan dengan penelitian ini, dapat berupa benda, barang. Adapun Subjek penelitian ini meliputi:

1. Kepala Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen
2. Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Berkah Muda”.
3. Satu anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Berkah Muda” yang aktif dan sudah mengikuti Pokdarwis selama 2 periode.
4. Ketua BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Lembupurwo.

5. Dua warga yang paling dekat dengan pesisir pantai yang menetap di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

Sedangkan objek penelitian ini ialah pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan lahan pesisir pantai di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen.

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian adalah suatu hal atau benda yang menyediakan informasi atau keterangan data yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ketepatan pemilihan sumber data pada penelitian sangat penting dan perlu diperhatikan oleh peneliti, karena apabila sumber data tidak valid dapat berakibat kesimpulan yang ditarik tidak sesuai dengan data atau tidak outentik. Sumber data terdiri dari sebagai berikut :

1. Sumber Primer

Data primer ialah data yang dihasilkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya atau tidak melalui perantara seperti individu, kelompok, ataupun objek penelitian. Data primer dapat dihasilkan melalui berbagai metode seperti melakukan wawancara, quesioner, observasi dan eksperimen.

Data primer sering kali dianggap sebagai sumber data terakurat dan outentik karena peneliti dapat mengumpulkan atau mengakumulasi data yang sepadan dengan tujuan penelitian serta memastikan bahwa data yang didapatkan sendiri merupakan data outentik dari sumbernya. Selain itu, dengan menggunakan data primer, peneliti dapat memperoleh data yang spesifik dan detail mengenai objek yang diteliti. Akan tetapi, dalam melakukan pengumpulan data primer juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu biaya yang relatif tinggi, waktu yang diperlukan untuk analisis data lebih terkuras, dan juga kemungkinan besar peneliti dalam memilih metode pengumpulan data atau menganalisis data.

Adapun penelitian sendiri memiliki data primer merupakan data yang dihasilkan melalui hasil wawancara oleh peneliti dengan beberapa

narasumber, diantaranya Kepala Desa Lembupurwo, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Berkah Muda” dan juga masyarakat lokal yang tinggal didaerah sekitar pesisir pantai.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder ialah informasi atau keterangan yang telah dibuat, dianalisis dan di publikasikan oleh pihak lain. Sumber sekunder ini biasanya dapat berupa tertulis maupun media (elektronik) yang berasal dari berbagai sumber seperti pemerintah, badan riset, organisasi, perusahaan maupun dari media massa.

Sumber data sekunder ialah data yang telah diperoleh oleh individu atau kelompok yang bukan merupakan pemilik data itu sendiri, melainkan didapatkan dari beberapa sumber yang telah tersedia, seperti laporan, publikasi data maupun database. Data ini biasanya telah disediakan oleh instansi atau organisasi yang nantinya dapat digunakan oleh individu ataupun kelompok lain untuk mencari data atau menganalisis data tersebut sebagai tujuan penelitian.

Adapun penelitian ini memiliki data sekunder yaitu berupa buku laporan dari desa, arsip desa, buku milik pokdarwis, struktur kepengurusan pokdarwis, buku edukasi wisata, jurnal pemberdayaan masyarakat pesisir, pengelolaan lahan pesisir pantai yang didapat dari jurnal, situs web dan lain sejenisnya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data yaitu metode guna mendapatkan data atau informasi dari sumber tertentu dengan cara mengumpulkan data. Teknik ini biasanya digunakan dalam penelitian ilmiah atau survei untuk mengumpulkan atau mengakumulasi data yang dibutuhkan guna menjawab pertanyaan penelitian atau tujuan survei. Oleh karena itu, metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data ialah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi ialah proses pengamatan dan penyusunan data yang berbasis terstruktur, logis atau masuk akal, objektif, serta rasional terhadap

suatu objek, kejadian serta situasi kondisi yang sebenarnya dengan maksud mendapatkan suatu informasi mengenai objek tersebut. Observasi juga dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung. Atau melalui penyelidikan yang dilakukan dengan panca indera dengan berfokus pada fenomena yang terjadi secara langsung dan tertangkap pada indra.⁴² Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung ke lapangan (*field research*) dan memperhatikan program kerja dari Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) “Berkah Muda” dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui Pengelolaan Lahan Pesisir Pantai Laguna Lemburpurwo.

2. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode akumulasi data primer yang penting dan bermanfaat serta untuk mendapatkan data yang mendalam dan komprehensif tentang topik yang sedang diteliti. Menurut Moleong, wawancara yaitu suatu kegiatan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) dan responden (interviewee) mempunyai tujuan atau artian tersendiri.⁴³ Metode wawancara juga memiliki artian mekanisme dilakukan untuk memperoleh data penelitian dengan melakukan kegiatan tanya jawab secara bertatap muka antara petunjuk wawancara. Dalam berwawancara bisa dilakukan melalui personal ataupun kelompok, sehingga di peroleh data informasi yang nyata.

Metode wawancara digunakan dengan tujuan mengetahui dengan jelas mengenai bagaimana upaya yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis) “Berkah Muda” untuk memberdayakan masyarakat dengan memanfaatkan lahan pesisir pantai sebagai wisata bahari di Pantai Laguna yang nantinya dapat menunjang perekonomian masyarakat Desa Lemburpurwo. Peneliti mewawancarai beberapa pihak diantaranya ialah Kepala Desa Lemburpurwo, Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

⁴² Abu Ahmadi, “Psikologi Sosial” (2018), hal. 21.

⁴³ Haris Herdiansyah, “Metodeologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial” (2019), hal. 118.

“Berkah Muda”, Anggota Kelompok Sadar Wisata serta beberapa warga setempat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu salah satu mekanisme yang digunakan oleh peneliti pengguna metode kualitatif dengan tujuan mendapatkan gambaran atau dokumen dari berbagai perspektif maupun paradigma subjek melalui media tertulis maupun non tulis yang dibuat langsung oleh pihak yang terlibat. Metode dokumentasi adalah metode akumulasi data yang menyusun data yang tersedia.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data ialah usaha yang dilakukan dalam memproses dan menafsirkan data yang diperoleh dalam penelitian atau pengumpulan informasi. Pada penelitian kualitatif sendiri, proses menganalisis data dilakukan sebelum melakukan observasi, selama observasi di lapangan, dan setelah melakukan observasi atau meninggalkan lapangan. Adapun metode yang digunakan yaitu analisis non teknis. Oleh karena itu, peneliti menggunakan tahapan-tahapan berikut ini pada saat pengamatan data kualitatif, diantaranya :

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data yaitu meringkas, memilih poin-poin penting dan memusatkan perhatian pada suatu hal yang hakiki, mencari tema dan pola serta menghapus hal-hal yang tidak dibutuhkan. Pada proses ini sangat penting karena dapat membantu peneliti menghindari informasi yang menyesatkan tidak diperlukan dalam penelitian serta mempercepat proses analisis data.

Reduksi data merupakan tahapan pertama yang dilakukan penulis setelah menerima data lapangan. Kemudian setelah data-data yang diinginkan sudah terkumpul, langkah berikutnya adalah memilah informasi yang diperlukan untuk penelitian dan penolakan informasi yang tidak perlu. Dalam hasil penelitian, reduksi data akan membantu peneliti dalam menyajikan data secara lebih jelas dan terstruktur.

Dengan demikian untuk memudahkan peneliti mengumpulkan data, data yang telah direduksi wajib menyajikan gambaran yang terstruktur dan bermakna. Pada saat mereduksi data peneliti mendapat bantuan dengan perangkat elektronik, mis. B. Pemberian kode untuk aspek-aspek tertentu.

Dalam mereduksi data ini, peneliti memiliki maksud yaitu pemilihan data dan penggunaan informasi atau keterangan yang penting pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Sadar Wisata yang berada di Desa Lembupurwo.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data adalah proses pemaparan informasi yang didapatkan dari pengumpulan informasi dikemas dalam format yang mudah dipahami dan sinkron dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, penyajian data dianggap sebagai tahapan atau mekanisme penting karena memberikan kemungkinan penulis untuk menyajikan data secara jelas dan terstruktur sehingga memberikan akses untuk interpretasi dan analisis data. Penyajian data ini dapat berupa tabel, grafik, maupun narasi.

Dalam penelitian kualitatif, materi dapat disajikan dalam satu bentuk paparan secara singkat. Pada tahap Penyajian Data sendiri, peneliti menyajikan data-data yang telah diseleksi sebelumnya oleh peneliti agar materi tersusun dengan baik dan pembaca dapat dengan mudah memahaminya.

3. *Conclusion Drawing* (Penarikan Kesimpulan)

Tahap ini membahas tentang proses pengambilan kesimpulan atau penarikan hasil penelitian maupun data yang dianalisis. Proses ini dilakukan setelah peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan mengartikan data untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini. Hal ini penulis gunakan untuk menarik kesimpulan dan memverifikasi informasi dari Desa Lembupurwo dan Kelompok Sadar Wisata, termasuk hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kelompok Sadar Wisata Desa Lembupurwo

1. Asal Usul Desa Lembupurwo

Desa Lembupurwo atau yang biasa dijuluki sebagai desa sapi ini terletak di Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen. Desa Lembupurwo ini berada di wilayah Kebumen timur yang tepatnya berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Desa Lembupurwo sendiri sudah ada sejak zaman Bupati Arumbinang yaitu dengan bersatunya empat desa. Diantaranya Desa Lengkong, Desa Aglik, Desa Tlogogunung dan Desa Pejaten, dengan alasan keempat desa tersebut memiliki sapi-sapi yang bagus maka Bupati Arumbinang memiliki ide untuk mempersatukan empat desa tersebut sampai sekarang.

Lembupurwo berasal dari kata *lembu* dan *purwo*. Kata *Lembu* sendiri berarti “Sapi” dan *Purwo* yang memiliki arti “Kawitan atau Permulaan” jadi makna dari Lembupurwo adalah “Permulaan Ada Sapi”. Kemudian munculah sapi-sapi lokal pertama yang bagus di desa ini lalu dikembangkan dan lahirlah desa bernama Desa Lempurwo. Tidak hanya itu, dahulu setiap rumah memiliki atau berternak sapi dengan jenis Sapi Brahma. Sapi jenis ini merupakan sapi dengan kualitas terbaik pada zamannya. Namun seiring berjalan dan berkembangnya teknologi, masyarakat Lembupurwo ini beralih menjadi petani, yaitu dengan membeli mesin sedot air, dengan begitu sapi sapi tersebut dijual. Karena para petani lebih berfokus pada pertanian sawah dan kebunnya daripada harus berternak sapi.

Pada tahun 2007 akhir, Desa Lembupurwo memiliki penawaran dari Dinas Kehutanan untuk diberikan bibit mangrove sebanyak 2000 bibit untuk bahan percobaan. Bibit tersebut disebar diberbagai penjuru pantai dan lebih banyak ditanami adalah disekitar Sungai Buntu, yang merupakan sungai terdekat dengan Pantai Lembupurwo ini. Bibit tersebut berkembang

baik dengan baik, sehingga membuat masyarakatnya bersemangat merawat dan membudidayakan supaya lebih berkembang baik lagi.

Penanaman bibit mangrove terpantau baik sehingga pada saat ada Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 2008 awal, mereka memberikan bantuan bibit cemara dengan jenis cemara laut untuk ditanam disekitar pantai sebanyak 5000 bibit. Pemberian bibit ini disambut baik oleh masyarakat Lembupurwo dan mereka berantusias membantu dalam penanaman bibit cemara ini. Bibit ini disebar luaskan ke desa-desa sekeliling pantai, yaitu Desa Mirit, Desa Tlogopragoto, Desa Wiromartan, Desa Tlogodepok, Desa Petikusan dan Desa Rowo.

Pada awal tahun 2010, Dinas Kehutanan kembali melakukan penawaran untuk bekerja sama dengan Desa Lembupurwo untuk membuat benih mangrove dan cemara. Sehingga pada akhir 2010, masyarakat Desa Lembupurwo dapat membuat benih tersebut secara mandiri. Kemudian mereka juga melakukan pembelian bibit cemara dengan warga Pemalang yang merupakan pesisir pantai utara. Dan untuk bibit mangrove mereka membeli di Cilacap.

Setelah pembelian bibit tersebut, pemerintah desa merasa kewalahan pada keberlangsungan perawatan bibit ini. Sehingga terbentuklah sebuah komunitas Petani Cemara pada tahun 2012 yang diketuai oleh Bapak Munadi. Pada saat itu, anggota kelompok tersebut dibilang sangat banyak, yakni sekitar 30 anggota. Namun seiring berjalannya waktu, kelompok ini semakin berkurang anggotanya, karena mereka disibukkan oleh pekerjaan mereka masing-masing. Ada yang berubah menjadi tani mandiri, ada yang tua kemudian memilih untuk istirahat, ada juga yang merantau keluar kota bahkan ada juga yang sudah meninggal.

Oleh karena itu, kelompok ini akhirnya mengalami pembaharuan pengurus secara keseluruhan. Pada tahun 2017 kelompok Tani Cemara resmi diubah nama menjadi Pokmaswas (Kelompok Masyarakat Pengawas). Kelompok ini diketuai oleh Bapak Cokro Aminoto. Pada saat

itu kelompok ini memiliki anggota sekitar 21 orang. Sama dengan pada masa kelompok Tani Cemara, tugas dari Pokmaswas adalah mengawasi habitat dan kelestarian laut. Pada masa jabatan Bapak Cokro ini terdapat sedikit perubahan kembali pada tahun 2018. Karena Bapak Cokro terpilih menjadi kepala desa yakni Desa Lembupurwo. Akhirnya Pokmaswas ini tidak berjalan atau mati.

Pada tahun 2020 setelah adanya Dinas Kelautan yang observasi ke Desa Lembupurwo, pemerintah desa akhirnya meresmikan adanya Kelompok Sadar Wisata yang bernama “Berkah Muda” yang diketuai oleh Marjuki yang berusia sekitar 27 tahun. Dengan alasan syarat dikatakannya suatu desa wisata adalah memiliki komunitas atau kelompok masyarakat yang terdiri dari para penduduk daerah tertentu, yang dapat saling interaksi secara langsung dibawah pengelolaan dan memiliki kepedulian dan kesadaran dalam partisipasi secara bersama dengan menyesuaikan kemampuan baik secara individu maupun kelompok.

Kelompok sadar wisata ini dibentuk atas dasar kepedulian pemuda terhadap perawatan lahan pesisir pantai yang semakin tidak terurus. Kelompok sadar wisata ini merupakan satu nama dengan Karang Taruna “Berkah Muda”, karena begitu minimnya pemuda pemudi yang ada di Desa Lembupurwo yang melek atas keterpurukan lahan pesisir ini.

Anggota Kelompok sadar wisata sendiri terdiri dari pemuda yang sudah lulus SMA atau sederajat dan juga dari kalangan bapak bapak muda yang masih menetap di Desa Lembupurwo. Mengapa demikian, karena semakin banyaknya pemuda-pemudi yang bergabung dalam kelompok sadar wisata ini, peluang maju nya program desa semakin besar. Karena adanya pemuda-pemudi yang mayoritas pemikirannya masih kekinian.

Mereka biasanya melakukan perkumpulan atau rapat selama dua pekan sekali yaitu dengan diadakannya arisan bergilir yang diikuti oleh seluruh anggota Kelompok Sadar Wisata. Dalam perkumpulan ini biasanya mereka membahas mengenai perkembangan serta kendala yang dihadapi pada saat mengelola lahan pesisir dan Pantai Laguna sendiri.

Kelompok sadar wisata ini bertugas dalam menangani aspirasi ataupun keluhan masyarakat serta mengawasi area laut atau ekosistem laut. Seperti jika ada nelayan yang menggunakan kapal besar tidak boleh berada dipinggir pantai, karena akan merusak ekosistem pantai tersebut. Kemudian juga jika ada penangkapan ikan yang dilindungi itu Pokmaswas harus melapor kepada atasan. yang kemudian di musyawarahkan dengan BUMDES yang berwenang dalam pengelolaan lahan pesisir ini.

Agenda rutin dari Kelompok sadar wisata ini adalah perkumpulan bersama kelompok lain yakni arisan yang dilakukan setiap malam jum'at pon, kemudian temu anggota atau musyawarah anggota dilakukan setiap satu bulan sekali biasanya pada minggu pertama, serta bersih-bersih pantai atau yang biasa disebut penghijauan lahan yang dilakukan setiap dua minggu sekali dengan penanaman pohon.

2. Terbentuknya Desa Wisata

Dulunya, Pantai Laguna bukan merupakan pantai yang dijadikan untuk wisata. Melainkan pantai yang hanya dijadikan sebagai tempat tradisi syawalan. Tradisi syawalan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan pada waktu satu minggu setelah idul fitri. Tradisi ini dilakukan oleh seluruh masyarakat desa sekitar pantai, yakni seluruh desa Kecamatan Bonorowo, Kecamatan mirit, dan beberapa desa dari Kecamatan Ambal. Dengan adanya tradisi ini turun temurun dari leluhur yang dipercayai dapat menghilangkan sial dan sebagai tolak bala. Karena konon katanya pada saat tanggal 7 syawal pemilik pantai selatan dan atas izin Allah swt. memberikan kemurahan hati untuk menghilangkan penyakit yang ada di tubuh manusia. Oleh karena itu, masyarakat juga melakukan tradisi larung, yaitu menghanyutkan beberapa sesajen berupa kepala sapi dan ayam cemani untuk santapan *Nyi Roro Kidul* (penunggu pantai selatan).

Akhirnya pada tahun 2013 desa wisata ini terbentuk, dimana pada awalnya masyarakat Desa Lemburwo bergotong royong membudidayakan bibit mangrove untuk ditanam guna memperindah

pemandangan di pantai. Setelah penanaman tersebut, seluruh masyarakat diperintahkan untuk berjaga malam dengan mendirikan pondok kecil didekat tanaman mangrove tersebut. Guna menyirami dan pemberian pupuk secara rutin ke tanaman mangrove tersebut.

Kemudian pada tahun yang sama, kembali ada mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Gadjah Mada yang bertempat di Desa Lembupurwo. Mahasiswa KKN mencetuskan pembuatan jembatan agar pengunjung tidak perlu menyebrangi Sungai Segara Anakan, karena hal tersebut dapat membahayakan pengunjung jika tiba-tiba air laut sedang pasang. Akhirnya mereka para mahasiswa memberikan bantuan tenaga dan sedikit dana untuk pembuatan jembatan tersebut. Setelah pembuatan jembatan ini, wisata Pantai Laguna ini menjadi ramai pengunjung. Karena mereka tidak perlu bersusah payah untuk menyebrangi sungai. Pembaruan ini tak lepas dari campur tangan berbagai pihak. Seperti adanya bantuan dari Bumdes, Karang Taruna, dan warga sekitar.

Bumdes disini berperan sebagai induk dari pengelolaan Pantai Laguna atau dikatakan pengelolaan Pantai Laguna ini dibawah naungan Bumdes. Tetapi Bumdes tidak hanya mengurus sendiri, melainkan dibantu oleh karang taruna. Karang Taruna yang berperan penting dalam pengelolaan desa wisata ini yaitu Karang Taruna dari Dukuh Pejaten yang bernama "Karang Taruna Berkah Muda". Dimana pedukuhan ini ditugaskan untuk membantu Bumdes dalam mengelola Pantai Laguna. Karang taruna sendiri membantu dalam bidang pengembangan sumber daya manusia nya. Misalnya dalam membantu upgrade atau pembaharuan mengenai pantai itu sendiri.

Puncak keramaian pantai ini hanya berlangsung selama 5 tahun, yaitu mulai dari 2013 hingga 2018. Keramaian ini bermula dengan adanya pembaruan dari pantai ini yaitu, adanya gumuk pasir yang indah. Dimana tempat ini digunakan sebagai tempat untuk mengabadikan sunset (matahari terbenam), serta biasa digunakan untuk berfoto pribadi maupun foto prewedding.

Menurut salah satu warga nya, Pantai Laguna ini berada pada lokasi yang strategis yaitu lokasi yang mempunyai ciri khas yang menawan. Yakni pada Laguna Telaga Payau berdekatan pada bibir pantai serta dikelilingi hutan cemara udang yang rimbun. Tak hanya itu, pantai ini merupakan muara dari Sungai Wawar yang mengalir dengan gemercik air yang menenangkan. Pemandangan sekitarnya di sulap menjadi sebuah oasis hijau yang dihiasi pohon bakau dan cemara yang memberikan kesan alami dan ketenangan.

Tak hanya itu, gambaran pesona keindahan Pantai Laguna ini juga terletak disebelah timur pantai rowo. Yaitu dengan adanya hamparan pasir bersih sepanjang 3 km, wisata mangrove (Hutan Payau), hutan cemara udang, gumuk pasir yang indah, serta adanya taman cemara yang teduh. Adapun hutan cemara ini dibudidayakan oleh kerja keras dan semangat daru Kelompok Tani Cemara bersama Pemerintah Desa Lembupurwo.

3. Produk yang Dihasilkan Oleh Pesisir Desa Wisata

Desa wisata merupakan suatu aset yang dimiliki desa yang berbasis pada potensi pedesaan dengan berbagai keunikan serta karakteristik yang dapat diberdayakan dan dikembangkan menjadi suatu produk wisata dengan tujuan menarik kunjungan wisatawan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa Desa Wisata merupakan suatu desa yang didalamnya terdapat wisata. Dengan adanya desa wisata ini desa tersebut secara tidak langsung terbantu pada sektor pariwisata pada bidang finansialnya.

Desa Lembupurwo sendiri merupakan salah satu desa yang dijuluki desa wisata diantara Kecamatan Mirit dan Kecamatan Bonorowo. Karena pada dasarnya Desa Lembupurwo telah masuk kategori desa wisata, salah satunya yaitu mempunyai objek-objek menarik berupa alam, seni budaya, legenda, makanan lokal, dan sebagainya untuk dikemas sebagai objek wisata. Oleh karena itu, hasil alam yang dihasilkan di desa ini juga beraneka ragam, seperti pada sektor pertanian, perikanan, peternakan dan juga pariwisatanya.

Dalam bidang pertanian masih kurang maksimal karena masyarakatnya kurang inovasi dan kurangnya motivasi dari pemerintah mengenai perkembangan pertanian. Dahulu, masyarakat pesisir memanfaatkan lahan pesisir untuk menanam palawija, seperti kacang, kedelai, dan jagung. Selain itu juga masyarakat desa ini menanam padi disawah walaupun hanya dapat memanen sekali dalam satu tahunnya.

Pada pesisir ini, masyarakat hanya menanam sayur-sayuran yang nilai jualnya rendah, seperti kangkung, bayam, terong dan lain sebagainya. Dengan alasan dengan menanam sayur tersebut perawatannya relatif mudah, sehingga tidak menyulitkan para petani dalam merawatnya. Tidak hanya itu, sayur sayuran tersebut juga dapat menghidupi keseharian petani sehingga tidak perlu membeli sayur dipasar. Untuk penjualan sayuran sendiri pada masing-masing petani berbeda-beda, sesuai dengan sayuran yang mereka tanam. Di Desa Lembupurwo ini sayuran yang paling mahal dan menonjol yaitu lenca, dengan harga pasar perkilonya mencapai Rp.17.000. Sedangkan yang paling murah yaitu kangkung, dengan harga pasarnya Rp. 2.000 per ikat.

Selain itu, pesisir ini juga terdapat sebuah kebun buah yakni kebun buah kelengkeng. Kebun ini berawal dari keisengan petani yang membeli bibit kelengkeng kemudian ditanam disebuah lahan pesisir yang ia garap. Setelah itu, bibit tersebut tumbuh dengan buah yang lebat, tetapi dengan tinggi pohon yang relatif rendah, sehingga mudah untuk memetikinya. Kemudian warga tersebut membeli bibit kelengkeng dengan jumlah banyak untuk kemudian ditanam di samping pohon kelengkeng yang pertama. Bibit tersebut tumbuh bersamaan dan berbuah lebat.

Karena kebun tersebut sudah dilihat dan dikenal oleh beberapa warga setempat yang ikut menggarap lahan pesisir tersebut, akhirnya pemilik kebun didatangi oleh perangkat desa untuk diwawancarai. Setelah itu, pemilik kebun yang bernama Latif mendapatkan bantuan pupuk dan perintilan alat untuk merawat kebun kelengkeng dari desa. Selain itu juga, pemerintah desa membantu merenovasi dan mendekor kebun supaya dapat

memperindah kebun tersebut dengan syarat kebun tersebut harus memiliki sistem bagi hasil dengan desa.

Akhirnya kebun kelengkeng diresmikan pada tahun 2022 dengan luas 3 hektare dalam pengelolaan yang dibagi-bagi dengan masyarakat. Dengan adanya kebun ini, Desa Lembupurwo semakin terkenal. Banyak sekali pengunjung yang datang untuk sekedar mencicipi kelengkeng tersebut ataupun berwisata keluarga. Pengunjung yang datang hanya perlu membayar Rp.5.000 untuk tiket masuknya, dengan keuntungan bebas memakan buah kelengkeng sepuasnya selama didalam kebun tersebut. Tetapi jika pengunjung ingin memetik buah kelengkeng dan dibawa pulang, akan dikenai biaya sesuai banyak atau sedikitnya buah yang dipetik. Untuk penghasilan dari kebun kelengkeng sendiri dipasok dengan harga Rp.40.000/kg. Sedangkan dalam satu pohon bisa menghasilkan kurang lebih 15-20 kg.

Selain adanya kebun buah kelengkeng ini, masih banyak produk yang ada di pesisir Pantai Laguna. Antara lain gumuk pasir yang membentang indah, hutan wisata (hutan pinus) yang membuat suasana pantai menjadi teduh, hutan mangrove yang mengelilingi gumuk pasir, dan yang terakhir ada air telaga payau dan konservasi penyu. Telaga Payau ini berada di tengah pesisir pantai dengan pemandangan hutan pinus yang indah. Keindahan inilah yang sering menjadi daya tarik lebih terhadap pengunjung Pantai Laguna ini.

B. Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Lahan Pesisir

Pertanian merupakan hal pokok dalam suatu desa dipedesaan. Begitu juga dengan Desa Lembupurwo ini. Pertanian disini masih dikatakan kurang karena adanya beberapa faktor, salah satunya penyerangan hama yang gencar. Dikatakan belum maju juga dengan alasan modal dengan hasilnya terkadang kurang *balance*. Akhirnya banyak lahan kosong yang terhampar. Lahan yang terhampar kosong disini merupakan tanah pesisir yang berada di sekitar Pantai Laguna Lembupurwo

Pesisir merupakan tanah yang berbatasan langsung dengan pantai. Sama halnya seperti di Desa Lembupurwo ini yang memiliki hamparan pasir yang cukup luas, hanya saja pada desa ini pesisirnya perlu dibagi menjadi dua bagian, yaitu pesisir bagian selatan dan pesisir bagian utara. Batasan wilayah pesisir selatan adalah 500 meter dari pantai, sedangkan wilayah pesisir utara adalah 500 meter dari pesisir selatan. Pesisir ini bukan hak milik dari warga desa maupun Desa Lembupurwo sendiri. Melainkan wilayah pesisir bagian selatan adalah milik TNI AD, sedangkan wilayah pesisir utara merupakan tanah Brosengojo atau tanah paten milik desa. Dimana jika masyarakat ingin menggarap lahan pesisir tersebut harus membayar uang sewa sebesar 400.000/tahun.

Tanah Brosengojo atau pesisir utara tersebut belum dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat desa tersebut. Dengan alasan tanah tersebut tanah yang kering dan jelek sehingga tidak cocok untuk pertanian. Padahal jika dilakukan edukasi terhadap masyarakat, lahan tersebut tidak hanya digunakan untuk pertanian saja, melainkan bisa digunakan sebagai peternakan, maupun perkembangan perikanan. Masyarakat lebih memilih menggarap lahan milik sendiri yang hasilnya pun terkadang tidak seimbang dengan modal yang dikeluarkan. Lahan pesisir sendiri memiliki keunikan tersendiri. Selain dijadikan sebagai pertanian, lahan ini juga pernah dijadikan tempat wisata berupa taman bunga. Akan tetapi, taman bunga tersebut tidak berjalan lama, karena kurangnya perawatan yang baik dari pihaknya.

Lahan pesisir ini dikelola oleh BUMDES (Badan Usaha Milik Desa) Lembupurwo, dimana tata kelolanya bukan dibawah pimpinan desa. Disini BUMDES bekerja sama dengan pemuda karangtaruna Pedukuhan Pejaten dan Lengkong. Karena pedukuhan ini merupakan pedukuhan yang paling dekat dengan pesisir Pantai Laguna. Disini pemuda karangtaruna melakukan edukasi terhadap masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan memanfaatkan tanah pertanian dengan baik. Tidak hanya itu, karangtaruna juga membantu masyarakat dalam melakukan pembuatan kartu tani yang nantinya dapat digunakan untuk membeli pupuk bersubsidi.

Kondisi pertanian di desa ini masih belum maju, karena masih terbatasnya tanaman yang ditanam masyarakat. Tanaman yang ditanam oleh masyarakat disini berupa sayuran yang meliputi cabe, terong, timun, tomat dan buah buahan seperti jambu kristal, jagung, jeruk dan pepaya. Dulunya masyarakat sering menanam buah semangka dan melon, tetapi saat ini tanah yang ditanami tersebut berubah menjadi kering, sehingga sulit untuk buah tersebut berbuah dan berkembang biak.

Seperti yang sudah disampaikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto bahwa terdapat beberapa tahapan dalam proses pemberdayaan di Desa Lembupurwo dalam pengelolaan lahan pesisir, yaitu :

1. Persepsi Masalah

Kesadaran masyarakat akan adanya masalah ataupun konflik yang dialami oleh masyarakat itu sendiri merupakan awal dari persepsi masalah ini. Artinya masyarakat disini harus mampu menganalisis situasi konflik atau isu yang ada. Persepsi masalah dalam masyarakat melibatkan individu ataupun kelompok menginterpretasikan dan memahami situasi atau isu tertentu. Konstruktivisme sosial tekanan bahwa persepsi seseorang mengenai masalah dipengaruhi oleh konstruksi sosial dan pengalaman hidup mereka.

Hal tersebut dibuktikan oleh salah satu informan yaitu Karto selaku warga yang tinggal di pesisir pantai. Beliau menyampaikan bahwasanya :

“ya kan dari kami masyarakat juga mengamati bagaimana perkembangan pertanian hari ke hari mba. Misal hari ini lebih buruk dari kemarin berarti kan perlu diadakan koreksi mba. Biasanya masalah yang dihadapi masyarakat pesisir saat ini ya itu mba mereka belum bisa manfaatin lahan pesisir yang udah disediakan oleh pemerintah desa dengan begitu luas. Petaninya juga masih kekusahan mencari bibit tanaman yang bagus untuk ditanam dilahan itu, terus juga perawatan minim biaya jadi petani ya seadanya aja nanamnya” .⁴⁴

Kemudian, hal tersebut juga diperkuat oleh Kepala desa Lembupurwo yang menjadi informan penulis, yaitu :

⁴⁴ Karto, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

“iya betul mba, dari desa sudah menyediakan tanah brosenjojo untuk digarap petani sini tapi malah ga dimanfaatkan dengan baik. Ya karena mungkin mereka masih kurang dalam hal garapan. Juga minimnya teknologi disini yang membuat masyarakat jadi tidak bisa memanfaatkan dengan baik”.⁴⁵

Pendapat lain disampaikan oleh Adit ketua BUMDES Lembupurwo yang menyampaikan :

“betul mba, masyarakat saat ini itu belum bisa mengelola lahan brosenjojo dengan baik. Kadang ada yang ngga balik modal, kadang ada yang sama sekali tidak untung. Karna mereka belum bisa memahami permasalahan dalam pertanian mba”.⁴⁶

Berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan oleh peneliti, masyarakat disini belum mengetahui bagaimana pemanfaatan lahan tersebut secara baik dan benar. Tidak hanya itu, keterbatasan pengetahuan dan gagap teknologi, juga menjadi faktor penyebab pengelolaan lahan tersebut terhambat.

Pernyataan tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Wrihatnolo dan Dwidjowijoto dimana dengan dimulainya kesadaran masyarakat akan masalah yang mereka hadapi dan alami, selanjutnya mereka akan mudah melakukan penanganan pada masalah tersebut. Penting juga adanya kesadaran akan pengenalan masalah dalam masyarakat, sehingga hal itu akan menjadi tonggak awal kemandirian dari masyarakat itu sendiri. Sama halnya dengan masyarakat yang tinggal di Desa Lembupurwo, mereka juga perlu adanya penerapan akan kesadaran masalah yang mereka alami, supaya hal tersebut dapat melatih kemandirian masyarakat Desa Lembupurwo itu.

2. Penyadaran

Suatu komunitas atau kelompok (masyarakat) perlu adanya peningkatan kesadaran akan masalah yang ada dimasyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, musyawarah, atau kampanye

⁴⁵ Cokro Aminoto, Kepala Desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁴⁶ Adit, ketua BUMDES, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

penyadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang dampak serta solusi yang ada. Dengan adanya penyadaran tersebut, nantinya kelompok ataupun komunitas itu dapat membantu masyarakat dalam menangani masalah dengan masyarakat.

Hal tersebut telah disampaikan oleh Marwan yang merupakan masyarakat yang tinggal dipesisir Desa Lembupurwo. Beliau menuturkan bahwa :

“pada tahun 2012 itu mba, masyarakat lagi mengalami musibah kemiskinan. Karena disini gagal panen, ya walaupun tidak semua si mba, tapi kebanyakan gagal panen karna serangan hama walangsangit sama banyak keong yang makan padi. Jadinya petani mengalami kerugian banyak. Bukanya balik modal malah rugi bandar. Dari musibah itu mba kami masyarakat jadi lebih was-was pas nggarap sama nanam taneman, takut musibah keulang lagi mba”.⁴⁷

Dari situ juga kepala desa Lembupurwo, Bapak Cokro Aminoto ikut menyampaikan bahwasanya :

“dari adanya kemiskinan itu ya mba, akhirnya pemuda pemudi disini itu membentuk suatu kelompok yaitu karang taruna. Karang taruna disini pertama kali dibentuk didusun saya di Pejaten. Karena emang pemuda pemudinya aktif dan ulet ya walaupun ga pinter pinter banget mba”.⁴⁸

Berdasarkan pernyataan dari kepala desa, akhirnya diperkuat lagi oleh Marjuki yang merupakan ketua dari Kelompok Sadar Wisata. Beliau menuturkan bahwasanya :

“iya mba, dulu pas lagi miskin miskin nya, anak muda disini jadi sering ngumpul, ya karna emang pada adu nasib lah mba. Dirumah terus juga bosen. Seringnya ngumpul itu dirumah saya, critanya rumah saya jadi basecamp lah mba. Pas itu karna semua anak muda kan pada ngrokok ya mba, jadi karna miskin itu kami pemuda jadi ga dikasih uang rokok. Kami bingung, akhirnya mutusin buat mbentuk usaha mba. Awale ya bisa dikatakan usaha buruh jasa mba. Upahnya ya cuma bisa buat beli rokok sama kopi lah mba. Kami sekelompok terdiri dari 6 orang. Akhire lama kelamaan penawaran jasanya laku akhire banyak yang gabung. Akhirnya kami memutuskan untuk membentuk kelompok untuk membantu masyarakat, tanpa imbalan.

⁴⁷ Marwan, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

⁴⁸ Cokro Aminoto, Kepala Desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober

Karena ya itu mba, kasian yang ga punya uang tapi butuh bantuan. Tapi ya tetep dikasih cuma seikhlasnya aja mba”.⁴⁹

Dari situ ada imbuhan dari warga setempat yang tinggal di sekitar pesisir pantai yaitu Maarwan. Yang menyampaikan bahwa:

“ya gitu lah mba dulu kondisi dari masyarakat Lembupurwo ini, miskin. Jangankan untuk beli sandangan, beli beras aja kadang harus jual ini itu. Untungnya si masalah itu langsung diatasi sama pemerintah, juga dibantu sama anak muda yang aktif itu mba. Yang tak kirain awale mereka mau bantu dengan mengharap imbalan, tapi ternyata membantunya mereka itu sukarela mba. Jadi kami masyarakat pas pas an sangat terbantu dengan adanya ke aktifan kelompok anak muda tersebut”.⁵⁰

Dari hasil observasi dan analisis peneliti mengenai hal tersebut disimpulkan bahwa dengan adanya kelompok sadar wisata ini masyarakat merasa terbantu. Hal ini juga sesuai dengan teori Pemberdayaan Masyarakat menurut Wrihatnolo dan Dwidjowijoto yang menyampaikan bahwa peningkatan kesadaran kepada masyarakat dan pemuda itu sangar penting. Dengan begitu pernyataan tersebut telah diterapkan pada masyarakat Desa Lembupurwo ini yang masih tidak menyangka bahwasanya anak muda mempunyai kesadaran akan keluhan masyarakat. Hal ini lah yang patut di apresiasi, karena kebanyakan anak muda tidak mau aktif dalam hal kemasyarakatan, apalagi harus terjun dalam dunia ekonomi dan sosial. Tidak hanya itu kelompok sadar wisata ini juga membantu dalam hal pengembangan SDM pada masyarakat Desa Lembupurwo. Melalui pengadaan seminar, pelatihan, dan juga sosialisasi mengenai dunia pertanian yang baik dan benar.

Tidak hanya itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat di Desa Lembupurwo ini tergolong sangat baik. Dibuktikan dengan adanya gotong royong masyarakat yang kesusahan. Dalam hal ini partisipasi memberikan penekanan pada perlunya memberdayakan kelompok sadar wisata untuk ikut serta dalam mendeteksi, memahami, dan

⁴⁹ Marjuki, ketua pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

⁵⁰ Marwan, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

mengatasi masalah yang mungkin muncul akibat aktivitas yang dilakukan masyarakat Desa Lembupurwo.

3. Pengkapasitasan

Pemberian pengetahuan dan ketrampilan kepada masyarakat dari komunitas yang memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi merupakan proses dari tahapan pemberdayaan masyarakat yaitu pengkapasitasan. Ini bisa melibatkan pelatihan teknis, managerial atau ketrampilan sosial. Pengkapasitasan merupakan sebuah komponen kunci dalam proses pemberdayaan masyarakat karena meningkatkan kemampuan mereka untuk mengambil kontrol atas masa depan mereka sendiri, mengatasi tantangan dan kendala serta mencapai tujuan pemberdayaan yang diinginkan. Pengkapasitasan sendiri membantu suatu individu maupun kelompok masyarakat untuk menjadi mandiri dan lebih berdaya.

Pada dasarnya masyarakat belum memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan memanfaatkan lahan pesisir tersebut dengan benar. Sehingga pada saat adanya suatu kelompok sadar wisata yang membantu dan mengarahkan tentang bagaimana cara pemanfaatan lahan pesisir dengan baik melalui kemampuan ataupun ketrampilan dari anggota kelompok tersebut maupun dari masyarakat itu sendiri.

Hal itu disampaikan oleh Marwan yang merupakan salah satu warga yang tinggal dipesisir. Beliau menyampaikan bahwa :

“saya dan masyarakat di Desa Lembupurwo ini ya sangat terbantu mba. Soale ngga cuma mbantu tenaga, pokdarwis ini juga membantu dalam barang mba. Misale itu kami pernah diberi bibit gratis, diberi pengetahuan juga. Pokdarwis ini pernah ngadain seminar di baledesa mba, pelatihan juga mba. Kami diajari buat manfaatin lahan kecil tapi bisa dapet hasil besar. Contohnya lahan brosenjojo yang digarap masyarakat sini itu mba. Pokoknya adanya pokdarwis ini membantu lah”.⁵¹

Hal tersebut juga ditanggapi oleh Sugito yang merupakan salah satu anggota kelompok sadar wisata. Beliau menyampaikan bahwa :

⁵¹ Marwan, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

“pokdarwis disini hanya bisa membantu sedikit lah mba, setidaknya biar masyarakat bisa mandiri kedepannya. Salah satu yang kami lakukan itu ya ngadain seminar, pelatihan sama sosialisasi mba. Kami itu lebih mengedepankan teknologi karena ya jaman sekarang kan berdampingan banget sama teknologi, jadi ya biar ga ketinggalan zaman aja. Terus nantinya juga masyarakat bisa memanfaatkan teknologi buat yang lebih berguna”.⁵²

Hal itu juga diperkuat oleh kepala desa Lembupurwo yaitu Cokro Aminoto. Beliau menegaskan bahwasanya :

“abis dilakukan sosialisasi pemasaran online itu mba, masyarakat disini jadi bisa menjual dagangannya ke online, jadi ga cuma jual lewat tengkulak langganan aja. Ada juga yang dijual sampe luar kota, kaya di Purworejo, Magelang, Indramayu dan Jogja. Uang yang dihasilkan juga lebih banyak jual di online mba. Tapi ya itu hanya berlaku buat yang pertaniannya sudah bervariasi. Kalau Cuma satu dua macam ya belum berani jual ke luar daerah”.⁵³

Pendapat lain disampaikan oleh Wawan yang merupakan ketua BUMDES Lembupurwo. Beliau menyampaikan :

“dari BUMDES sendiri juga terbantu kok mba, kan jadi ada yang memantau masyarakat, membantu masyarakat bukan cuma dari BUMDES gitu. Ya saya mewakili BUMDES sangat berterima kasih sama pokdarwis. Karna hasil panen masyarakat juga menjadi lebih baik tiap tahunnya gitu mba”.⁵⁴

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang peneliti lakukan, dalam tahapan pengkapasitasan ini kelompok sadar wisata sudah dikatakan baik dalam membantu pemberdayaan masyarakat di Desa Lembupurwo ini. Pokdarwis sendiri dinilai positif oleh masyarakat desa karena bantuannya yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk tenaga, tetapi juga barang serta pengetahuan. Sehingga itu membuat masyarakat nantinya dapat menggunakan sendiri dan dapat menjadikan masyarakat Desa

⁵² Sugito, anggota pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

⁵³ Cokro Aminoto, Kepala Desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁵⁴ Wawan, ketua BUMDES, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

Lembupurwo menjadi mandiri melalui pemberdayaan yang dilakukan oleh pokdarwis tersebut.

Dalam pengkapasitasanya, pokdarwis lebih menekankan pada aspek teknologi. Karena hal ini sangat penting disosialisasikan kepada masyarakat guna menunjang keberlangsungan usaha. Dapat dilihat dari proses pemasaran, yang sebelumnya hanya dijual kepada tengkulak langganan, sekarang sudah bisa dijual keluar daerah. Hal itulah yang membuat perekonomian di desa ini cukup dinilai meningkat.

4. Pendayaan

Setelah masyarakat mempunyai wawasan dan kemampuan yang memadai, kemudian dilakukan dengan membentuk atau memperkuat organisasi yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi, komunikasi, dan mengkoordinasikan aktivitas mereka. Hal ini termasuk membentuk kelompok, asosiasi, atau lembaga yang sesuai dengan program yang mereka jalankan.

Teori pendayaan dalam konteks ini melibatkan upaya kelompok sadar wisata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai pertanian, pelestarian lingkungan, dan dampak positif ekonomi lokal. Dengan melakukan penyuluhan, kegiatan promosi, serta kolaborasi dengan masyarakat dengan masyarakat untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat pertanian berkelanjutan. Dengan begitu kelompok sadar wisata ikut serta dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian serta pengembangan ekonomi lokal.

Menurut Cokro Aminoto yang merupakan kepala desa Lembupurwo menyampaikan bahwa :

“saya disini menggerakkan pemuda-pemudi untuk menjadi pemuda-pemudi yang bermanfaat. Dibuktikan dengan pencapaian sama relasinya mba. Karena menurut saya mba, jika disuatu desa tidak memiliki komunitas ataupun organisasi, niscaya desa tersebut berasa mati dan hampa karena tidak adanya paguyuban dari masyarakat. Sebenarnya diantara banyaknya komunitas, organisasi atau perkumpulan itu ga cuma anak muda si mba, ada juga dari ibu-ibu kaya arisan, PKK, dan ibu muslimat. Kalau dari bapak-bapak ya itu ada paguyuban RT, ada kelompok tahlilan juga. Disini Pokdarwis juga

menjalin kerjasama dengan pihak luar mba, ada dari Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Polsek, Pemerintah Desa dan sebagainya, sehingga nantinya kalau dari pokdarwis sedang melakukan kegiatan sudah ada yang back up mba”.⁵⁵

Hal itu juga disampaikan oleh anggota dari pokdarwis yaitu Sugito. Beliau menyampaikan bahwa :

“benar mba, kami tidak hanya bergerak sendiri. Tapi juga kami melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Ya itu sama dinas pertanian, pemerintah desa, BUMDES, dan kelompok-kelompok sama organisasi lain. Biar kerukunannya itu terjaga mba. Jarang-jarang anak muda sekarang mau ngumpul dan mau ikut organisasi desa soale mba. Jadi saya setuju kalau organisasi atau perkumpulan didesa itu diperkuat dengan kolaborasi pihak”.⁵⁶

Kemudian Marjuki yang merupakan ketua dari Pokdarwis menyampaikan bahwa :

“iya mba betul. Apalagi di Lembupurwo ini kan dikatakan desa wisata ya, makanya perlu adanya organisasi yang bisa ikut berkontribusi pada desa wisata ini mba. Disini kami melakukan kolaborasi dengan organisasi juga banyak mba, kaya ada karangtaruna di sembilan pedukuhan, terus ada pokdarwis, IPNU-IPPNU, sama perkumpulan anak muda yang suka burung dara itu mba. Tidak hanya itu si mba, kami juga udah kolaborasi dengan Dinas Pertanian dengan hasil sumbangan bibit, kemudian dari Dinas Pariwisata itu ada bantuan fasilitas penunjuk arah dan dana. Jadi perkumpulannya lumayan rukun. Mereka membentuk organisasi juga tidak hanya untuk kumpul-kumpul aja mba. Tapi sebisa mungkin harus bisa bermanfaat buat masyarakat setempat khususnya”.⁵⁷

Dari hasil observasi dan analisis yang dilakukan peneliti, dapat disimpulkan bahwa dengan melakukan kolaborasi ataupun kerjasama dengan pihak lain, kelompok sadar wisata sendiri membangun banyak relasi untuk meningkatkan kualitas pertanian di Desa Lembupurwo dengan berkelanjutan. Dibuktikan dengan adanya hasil kerjasama dengan berbagai pihak seperti sumbangan bibit, sumbangan dana, bantuan fasilitas dan

⁵⁵ Cokro Aminoto, Kepala Desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁵⁶ Sugito, anggota pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

⁵⁷ Marjuki, Ketua Pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

yang lainnya. Jadi akan sangat menguntungkan jika kerjasama dibangun oleh pokdarwis dengan pihak luar.

Di Desa Lembupurwo ini mempunyai banyak kelompok dan komunitas. Diantara begitu banyaknya komunitas, masing-masing mempunyai tugas tersendiri sesuai dengan komunitasnya tersebut. Melalui pengorganisasian yang dilakukan secara efektif, proses pemberdayaan dapat lebih terarah, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan memperoleh hasil yang berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kemandirian masyarakat yang dilibatkan.

Komunitas disini tidak hanya sekedar dibentuk secara cuma-cuma, melainkan mereka harus menjalankan tugas sesuai dengan tupoksi mereka. Mereka juga wajib mengayomi masyarakat terutama di Desa Lembupurwo dan yang terpenting mereka harus bisa memberikan *feedback* yang baik kepada pemerintah desa dan juga masyarakat Desa Lembupurwo sendiri.

Di Desa Lembupurwo masing-masing komunitas berjalan dengan baik, komunitas ini juga banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Antara lain, Kelompok sadar wisata yang membantu masyarakat dalam mengelola lahan mereka dengan baik dan memanfaatkan lahan supaya dapat menghasilkan panen yang banyak. Kemudian karang taruna sendiri sudah memberikan beberapa pelatihan menggunakan sosial media dengan baik, supaya masyarakat tidak terlalu ketinggalan dunia teknologi.

C. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Lahan Pesisir

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Dalam strategi pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia mengacu pada peran individu-individu yang terlibat pada proses pemberdayaan tersebut. Dalam mengembangkan suatu sumber daya manusia diperlukan fasilitas yang memadai kepada masyarakat seperti pelatihan skill atau ketrampilan dan memperluas wawasan. Pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas

hidup masyarakat setempat sambil menjaga dan merawat ekosistem pesisir.

Pengembangan sumberdaya manusia ini sangat penting, karena berperan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat setempat mengenai pentingnya konservasi lahan pesisir dan dampak-dampak lingkungan yang terkait. Dengan memberikan edukasi atau pemahaman serta pelatihan kepada masyarakat mengenai bagaimana upaya yang dilakukan untuk menjaga ekosistem yang ada dipesisir pantai.

Seperti yang disampaikan oleh Cokro Aminoto sebagai Kepala Desa Lembupurwo. Beliau menyampaikan bahwasanya :

“kalau pengembangan SDM sendiri itu dengan cara mengajari masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan lahan pesisir pantai atau disebut lahan brosenjojo mba. Kan masing-masing sewanya kan sedikit ya mba, jadi harus dimanfaatkan dengan baik. Bagaimana caranya punya lahan sedikit tapi hasilnya banyak. Yaitu dengan menerapkan tanam tumpang sari. Jadi kadang ada seminar pelatihan dari pokdarwis yang bekerja sama dengan dinas pertanian setempat mengenai sistem tanam tumpang sari”.⁵⁸

Tidak hanya itu, kelompok sadar wisata ini juga membantu masyarakat setempat jika mempunyai aspirasi yang perlu disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang. Seperti yang telah disampaikan oleh Marjuki ketua pokdarwis. Beliau menuturkan bahwa :

“ooi ya mba. Ga cuma mengedukasi aja si. Dari pokdarwis juga menampung keluhan kesah dari masyarakat yang ikut nggarap lahan brosenjojo itu. Kadang kan ada yang butuh obat kan mba apa mes gitu, nah dari pokdarwis kadang sesekali membantu mencarikan pupuk ke agen mba. Kami dari pokdarwis juga sudah mengajarkan tentang pembuatan pupuk kandang atau pupuk organik. Jadi nantinya tanamannya lebih sedikit makan kimia”.⁵⁹

Pendapat lain disampaikan oleh Karto yang merupakan masyarakat lokal :

“iya itu mba. Pengalaman saya sendiri lah ya mba, saya diajarkan buat pupuk organik itu dari kotoran sapi, ya karna saya kan

⁵⁸ Cokro Aminoto, Kepala Desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁵⁹ Marjuki, ketua pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

dirumah punyane sapi. Dan lumayan manjur mba, bener bener luar biasa. Ngga Cuma itu si mba, pokdarwis juga sering jadi tempat curhatan warga yang nggarap lahan brosenjojo. Ya namanya orang miskin kadang keluh kesah ngga digubris sama atasan. Jadi saya lebih sering diskusi sama pokdarwis ini mba. Karna kan ibaratnya wawasan anak muda lebih banyak ketimbang saya yang udah tua gini”.⁶⁰

Dari hasil observasi dan analisis dari peneliti diperoleh bahwa pengembangan sumber daya manusia disini adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat Desa Lemburpurwo mengenai proses pembuatan pupuk organik dan pupuk kompos. Dengan memanfaatkan bahan dan peralatan yang sudah ada. Hal tersebut dinilai sangat membantu masyarakat yang kurang mampu yang ikut menggarap lahan brosenjojo. Dan juga dapat meminimalisir biaya untuk pembelian pupuk, karena bisa memanfaatkan hewan ternak yang masyarakat miliki, seperti ayam, sapi, kambing, kelinci dan sebagainya. Akan tetapi, tak jarang masyarakat yang belum bisa mengikuti pelatihan kemampuan dengan baik. Karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki masyarakat sehingga terdapat beberapa yang belum maksimal.

2. Pengembangan Kelembagaan Kelompok

Pada strategi pemberdayaan masyarakat, pengembangan kelembagaan kelompok sadar wisata ini adalah poin penting terutama pada sektor wisatanya. Hal ini memberikan landasan untuk pengembangan kelembagaan Kelompok Sadar Wisata dalam konteks strategi pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata lokal. Pada poin ini, dimulai dengan pemahaman tentang konsep kelompok sadar wisata sendiri. Hal ini meliputi tujuan, peran, dan fungsi kelompok sadar wisata dalam mendukung pengembangan pariwisata lokal.

Seperti yang disampaikan oleh Marjuki ketua pokdarwis. Beliau menyampaikan :

“oh ya mba, pokdarwis ini dibentuk karna dulu pas lagi miskin miskin nya, anak muda disini jadi sering ngumpul, ya karna emang pada adu nasib lah mba. Dirumah terus juga bosan. Seringnya ngumpul

⁶⁰ Karto, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lemburpurwo, 14 September 2023.

itu dirumah saya, critanya rumah saya jadi basecamp lah mba. Pas itu karna semua anak muda kan pada ngrok ya mba, jadi karna miskin itu kami pemuda jadi ga dikasih uang rokok. Kami bingung, akhirnya mutusin buat mbentuk usaha mba. Awale ya bisa dikatakan usaha buruh jasa mba kami sekelompok terdiri dari 6 orang. Akhire lama kelamaan penawaran jasanya laku akhire banyak yang gabung. Akhirnya kami memutuskan untuk membentuk kelompok untuk membantu masyarakat, tanpa imbalan”.⁶¹

Pokdarwis ini dibentuk bukan hanya cuma-cuma melainkan dengan tujuan. Seperti yang telah disampaikan oleh Sugito yang merupakan anggota pokdarwis. Beliau menuturkan :

“tujuan dibentuknya pokdarwis ini ya untuk membantu masyarakat aja si mba. Juga untuk melestarikan ekosistem laut yang kadang rusak gitu. Ceritanya kaya jadi garda depan untuk urusan ekosistem laut mba. Ngga cuma itu aja mba, kami juga selalu memantau perkembangan masyarakat yang bertani. Soale kadang ada keluhan dari masyarakat itu si mba, jadi nantinya dari pokdarwis yang menyampaikan ke atasan atau pemerintah desa”.⁶²

Pendapat lain disampaikan oleh Adit yang merupakan ketua Bumdes Lembupurwo. Beliau menyampaikan :

“perkembangan dari pokdarwis ini saya sangat apresiasi mba, karena dari tahun ke tahun itu masyarakat jadi bisa lebih mandiri ya walaupun masih ada yang belum si. Tapi perkembangan kelompok ini sangat bagus. Sesuai sama tujuan dari pokdarwis ini si mba, tidak lain untuk mensejahterakan masyarakat, terutama petani”.⁶³

Kemudian diperkuat oleh Kepala desa Lembupurwo, Cokro Aminoto yang menyampaikan :

“iya mba. Pokdarwis sudah banyak membantu masyarakat. Yang awalnya bantu tenaga, kemudian bantu pemikiran, terus bantu pembibitan, sekarang bantu pemupukan. Jadi progres kelompok ini sudah cukup baik. Meskipun banyak terkendala fasilitas juga mba. Kadang kan dari desa juga ngga sepenuhnya bisa bantu”.⁶⁴

⁶¹ Marjuki, ketua pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁶² Sugito, anggota pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

⁶³ Adit, ketua BUMDES, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 14 September 2023.

⁶⁴ Cokro Aminoto, Kepala desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari peneliti, bahwasanya kinerja dari pokdarwis ini sudah sesuai dengan tujuan dari terbentuknya kelompok sadar wisata itu sendiri. Dapat dilihat dari perubahan dari belum adanya kelompok sadar wisata dengan sesudah mendapat sentuhan oleh kelompok ini. Pertanian menjadi lebih baik dan hasil yang didapatkan dapat menutup pengeluaran dari masyarakat sendiri.

Dari mulai adanya bantuan tenaga untuk membantu penanaman tanaman, kemudian ada bantuan pemikiran mengenai bagaimana strategi yang cocok diterapkan di tanah Lembupurwo sendiri, lalu ada bantuan pembibitan dimana pokdarwis ini membantu pemilihan dan pembuatan bibit tanaman bersama masyarakat, dan ada bantuan pemupukan yaitu pembuatan pupuk dengan memanfaatkan barang dan bahan yang sudah tersedia. Sehingga dalam konteks pemberdayaan masyarakat disini pokdarwis sudah melakukan strateginya yaitu pengembangan kelembagaan kelompok.

3. Pemupukan Modal Masyarakat

Pada poin ini masyarakat dapat diberikan bantuan modal terlebih dahulu untuk menjalankan pertanian yang nantinya dapat menunjang ataupun dapat menstabilkan perekonomian masyarakat. Tidak hanya diberikan bantuan dana saja, tetapi juga perlu adanya bantuan fasilitas serta sarana dan prasarana.

Dalam hal ini masyarakat diberikan modal dalam mengembangkan pertanian oleh pemerintah desa. Sehingga bagi masyarakat yang kurang mampu dan tidak memiliki tanah tetap bisa bertani.

Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala desa Lembupurwo, Cokro Aminoto Ketua Pokdarwis, Marjuki yang menyampikan :

“bener mba. Awalnya itu ya masyarakat diberikan lahan brosenjojo untuk digarap. Dengan sistem gratis itu mba awale. Ya walaupun sedikit tapi setidaknya ikut ngrasain bertani mba. Yang nggarap juga hanya orang-orang yang kurang mampu mba. Lahan Brosenjojo itu kan ada sekitar sembilan hektare mba, kemudian dibagi dua. Ada lima hektare untuk digarap masyarakat, sedangkan yang empat hektare lainnya itu digarap oleh perabot desa. Untuk satu

hektarenya itu digarap oleh empat orang mba. Nah untuk pembayaran pajaknya itu setiap satu tahun sekali dengan biaya satu hektare sebesar empat ratus ribu. jadi masing-masing orang dikenakan seratus ribu saja.”⁶⁵

Hal tersebut juga disampaikan oleh Ketua Pokdarwis, Marjuki Beliau menuturkan bahwa :

“nah iya mba, dari desa itu memberikan modal berupa lahan pertanian itu lahan brosenjojo untuk masyarakat dengan sistem bagi hasil. Untuk masyarakatnya biasanya diganti pertahunnya mba. Tapi jika yang sudah menggarap ingin menggarap lagi juga boleh mba. Dengan syarakat sudah tidak ada yang daftar. Masyarakat boleh memanfaatkan lahan tersebut untuk ditanami tanaman apapun. Kalau gitu kan saya mikirnya masyarakat yang ngga punya tanah garapan kan jadi terbantu dengan adanya pemupukan modal ini. Tapi ya gitu mba banyak masyarakat yang masih belum maksimal buat manfaatin tanah brosenjojo itu”.⁶⁶

Pendapat lain disampaikan oleh Marwan, masyarakat yang menggarap lahan brosenjojo. Menyampaikan :

“emang iya si mba, dari desa awale itu ngasih modal lahan buat masyarakat gunakan. Tapi dari masyarakat sendiri kan masih awam lah. Kadang juga bingung mau ditanam apa mba. Tapi pas ada sosialisasi dari pokdarwis jadi ada gambaran si, sampe sekarang itu mba udah balik modal malah saya. Karna saya menerapkan sistem tumpang sari yang diajarkan sama dinas pertanian sama pokdarwis taun lalu mba”.⁶⁷

Berdasarkan observasi dan analisis yang dilakukan oleh penulis, disimpulkan bahwa dengan adanya pemupukan modal dari desa dapat menjadi tonggak awal pemberdayaan masyarakat. Seperti halnya di Desa Lembupurwo, dimana dengan pemupukan modal dan sistem bagi hasil yang dinilai cukup terjangkau membuat masyarakat jadi tidak keberatan dalam menggarap lahan brosenjojo tersebut. Pemberdayaan yang ada di Desa Lembupurwo ini dilakukan dengan memberdayakan masyarakat kelompok miskin dari sumberdaya yang tidak produktif menjadi produktif

⁶⁵Marjuki, ketua pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁶⁶ Cokro Aminoto, Kepala desa, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

⁶⁷ Marwan, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

sudah berhasil. Dilihat dengan meningkatnya ekonomi masyarakat di desa ini. Sampai saat ini banyak masyarakat yang sudah balik modal bahkan untung.

4. Pengembangan Usaha Produktif

Pengembangan usaha produktif adalah salah satu poin penting dalam strategi pemberdayaan masyarakat. Hal ini menuju pada membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha yang dapat menghasilkan produk dengan nilai tinggi.

Seperti yang disampaikan oleh Marwan yang merupakan masyarakat lokal yang mempunyai usaha dibidang pertanian yaitu penjual sayur. Beliau menyampaikan :

“saya yang punya usaha ya merasa terbantu mba. Karna pokdarwis ini mengajari saya untuk berjualan online juga. Misal saya panen cabe, nanti saya share ke facebook apa status wa gitu mba. Jadi yang beli itu ngga Cuma orang sini-sini aja, jadi lebih menjangkau luas gitu mba”.⁶⁸

Terdapat pendapat dari Marjuki yang merupakan ketua pokdarwis. Beliau menyampaikan :

“betul sekali mba. Dari pokdarwis sendiri membantu mengembangkan usaha masyarakat mba. Kalau dibidang pertanian ya paling jual beli sayur mba. Dan kami Cuma bisa bantu pada pemasaran si. Terus juga kami bantu teknik panen biar ngga gampang layu sayuran nya. Kami juga memantau usaha masyarakat supaya dapat berjalan dengan maksimal. Insyaallah kami tidak hanya membantu dalam hal finansial, tetapi juga bersedia membantu dalam hal tenaga”.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi dan analisis yang dilakukan peneliti bahwa adanya pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh pokdarwis sendiri sudah termasuk kedalam strategi pemberdayaan masyarakat. Karena sudah diterapkan pada Desa Lembupurwo dimana usaha dari masyarakat berjalan dengan baik dengan dibantu oleh pokdarwis. Dengan pengembangan usaha ini, masyarakat akan lebih bisa

⁶⁸ Marwan, masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.

⁶⁹ Marjuki, ketua pokdarwis, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

mandiri dan bisa dengan mudah mencapai kesejahteraan masyarakat. Atau lebih dikenal masyarakat yang terberdaya.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah proses pembentukan masyarakat supaya dapat berinisiatif dalam melakukan kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Proses pemberdayaan di Desa Lembupurwo dilakukan dengan empat tahapan sesuai dengan yang telah disampaikan oleh , yaitu persepsi masalah dimana masyarakat disini harus mampu menganalisis situasi konflik atau isu yang ada. Kemudian tahapan kedua yaitu kesadaran dimana tahap ini dilaksanakan mulai dari peningkatan kesadaran suatu komunitas atau kelompok (masyarakat) akan masalah tersebut. Tahapan ketiga yaitu pengkapasitasan dimana pada tahap ini melibatkan pemberian pengetahuan dan ketrampilan kepada anggota komunitas yang memungkinkan mereka untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Tahap keempat yaitu pendayaan dimana pada tahap ini dilakukan dengan membentuk atau memperkuat organisasi yang memungkinkan mereka untuk berkolaborasi, komunikasi, dan mengkoordinasikan aktivitas mereka.

Kemudian strategi pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata ini ada empat. Pertama yaitu pengembangan sumberdaya manusia. Kelompok sadar wisata ini telah melakukan upaya dengan mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pemanfaatan lahan pesisir serta dampak apa yang akan diterima ketika tidak memanfaatkan lahan pesisir dengan baik. Kedua yaitu pengembangan kelembagaan kelompok. Dibuktikan dengan dibentuknya suatu kelompok sadar wisata yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah desa. Kemudian strategi yang ketiga yaitu pemupukan modal masyarakat. Hal ini dilakukan oleh kelompok sadar wisata melalui pelatihan untuk pengembangan skill atau ketrampilan oleh kelompok sadar wisata.

Kemudian strategi yang terakhir yaitu pengembangan usaha produktif. Disini masyarakat akan dibimbing dalam mengembangkan usaha atau bisnisnya dengan memanfaatkan teknologi maupun fasilitas desa yang ada. Dengan adanya pengembangan usaha ini, masyarakat diharapkan mampu mendongkrak ekonomi mereka dimasa yang akan datang.

B. Saran

1. Bagi masyarakat

Diharapkan kepada masyarakat untuk bisa mandiri dan terus melakukan inovasi supaya tidak mengalami ketertinggalan.

2. Bagi Kelompok Sadar Wisata

Diharapkan kelompok sadar wisata ini konsisten memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang belum mampu menerapkan kemandirian dan terus membuat program yang bagus untuk masyarakat.

3. Bagi kepala desa

Diharapkan dapat mendukung program yang berjalan didesa untuk mensejahterakan masyarakat.

4. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meneliti lebih mendalam lagi dan informan yang lebih banyak, guna mendapatkan penelitian secara detail dan menyeluruh terkait pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A Muri Yusuf, *Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta : Kencana, 2014)
- Arismayanti, N. K. 2015. Pariwisata Hijau Sebagai Alternatif Pengembangan Desa Wisata di Indonesia. *Jurnal Analisis Pariwisata*, 15(1), 1-15.
- Asari, A., Toloh, B. H., & Sangari, J. R. 2018. Pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat di desa Bahoi, kecamatan Likupang Barat, kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Platak*, 6(1), 29-41.
- Bintan, P. K. 2018. Pengembangan Ekowisata Bahari Berbasis Keankaragaman Hayati Pada Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pengudang Bintan Mangrove Di Desa.
- Cokro Aminoto, Kepala Desa Lembupurwo, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.
- Dewi, N. M. N. B. S. 2020. Kajian Partisipasi Masyarakat Dusun Bone Putih Dalam Pengelolaan Sampah. *Sosial Sains Dan Teknologi*, 1(1), 32-40.
- Endah, K. (2020). Pemberdayaan masyarakat: Menggali potensi lokal desa. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), 135-143.
- Herdiansyah, H. 2010. Metodologi penelitian kualitatif untuk ilmu-ilmu sosial.
- Jufri, A., & Firmansyah, M. 2019. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Pengembangan Pariwisata Melalui Pengelolaan Desa Wisata Pantai Gili Gede Sekotong Kabupaten Lombok Barat. *Journal of Economics and Business*, 5(2), 32-51.
- Karto, Masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.
- Laily, E. I. A. N., & Imro'atin, E. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif. *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3(2), 186-190.
- Laraswati, L., Pradipta, M. P. Y., & Wahyuningsih, H. 2021. Pemberdayaan masyarakat melalui pokdarwis untuk mengembangkan desa wisata Sumberbulu Di Desa Pendem Mojogedang Karanganyar. *Jurnal Pariwisata Indonesia*, 16(1), 58-68.
- Made, U., & Madinawati, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Optimalisasi Lahan Pekarangan dengan Budidaya Sayuran Organik Untuk

- Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat. *Jurnal Abditani*, 3(1), 14-19.
- Margayaningsih, D. I. (2018). Peran Masyarakat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa. *Publiciana*, 11(1), 72-88.
- Marjuki, Ketua Kelompok Sadar Wisata, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 30 Agustus 2023.
- Marwan, Masyarakat, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.
- Maryani, D., & Nainggolan, R. R. E. 2019. Pemberdayaan masyarakat. Deepublish.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *CIVIS* 1.2 2011.
- Oka A. Yoeti. 2008 *Perencanaan & Pengembangan Pariwisata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Paramitha, O. D., Kagungan, D., & Mulyana, N. 2020. Strategi Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Tanggamus. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 2(2), 75-86.
- Pragawati, B. 2009. Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Untuk Pengembangan Ekowisata Bahari Di Pantai Binangun, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.
- Putra, C. K. 2018. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Pada Desa Wonorejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang) (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Sany, U. P. 2019. Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Al Qur'an. *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39(1), 32-44.
- Sarinah, I., Sihabudin, A. A., & Suwarlan, E. (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 5(3), 267-277.
- Sugito, anggota Kelompok Sadar Wisata, wawancara dengan penulis, Lembupurwo, 04 Oktober 2023.

- Sutiani, N. W. (2021). Peran Serta Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dalam Pengembangan Desa Wisata di Desa Taro Kecamatan Tegallalang Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(2), 70-79.
- T. Prasetyo Hadi Atmoko. "Strategi Pengembangan Potensi Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman", dalam jurnal Media Wisata, Vol.12, No.2, (2014), hlm. 147, dalam <http://amptajurnal.ac.id>.
- Tafalas, M. (2010). Dampak Pengembangan Ekowisata Terhadap Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masyarakat Lokal (Studi Kasus Ekowisata Bahari Pulau Mansuar Kabupaten Raja Ampat).
- Victoria br. Simanungkalit, dkk. 2012. *Buku Panduan Pengembangan Wisata Hijau*, (Jakarta : Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia).
- Vigih Herry Kristanto, *Metodologi Penulisan Karya Tulis Ilmiah (KTI)*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2018)
- Wahyuni, D. 2018. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83-100.
- Wahyuni, D. 2018. Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83-100.
- Wirajuna, B., & Supriadi, B. 2017. Peranan kelompok sadar wisata untuk meningkatkan keamanan wisatawan: studi kasus di Jerowaru Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Pariwisata Pesona*, 2(2), 15.
- Wirawan, R., & Nurpratiwi, R. 2015. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 4(2).
- Zuliyah, S. (2010). Strategi pemberdayaan masyarakat desa dalam menunjang pembangunan daerah. *Journal of Rural and Development*, 1(2).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Profil Kelompok Sadar Wisata



**KELOMPOK SADAR WISATA
“BERKAH MUDA”
DESA LEMBUPURWO KECAMATAN MIRIT**

*Jln. Karangsalam No. 30 ☎ 08562606625 ✉ 53151 e-mail
arifin.wisata@gmail.com*

**ANGGARAN DASAR
KELOMPOK SADAR WISATA “TIRTA KAMULYAN”**

**BAB I
NAMA LEMBAGA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

Pasal 1

Nama Lembaga
Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Berkah Muda”

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan
Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah

**BAB II
TUJUAN**

Pasal 3

Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) “Berkah Muda” bertujuan untuk meningkatkan hubungan kekeluargaan dan menjaga kelestarian lingkungan beserta habitatnya.

**BAB III
SASARAN**

Pasal 4

Sasaran dari pembentukan Kelompok Sadar Wisata adalah mewujudkan sebagaimana dalam Bab II pasal 2 diatas bagi seluruh anggota Kelompok Sadar Wisata secara optimal.

**BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 5

Susunan organisasi Kelompok Sadar Wisata adalah :

1. Pembina
2. Pengurus
3. Anggota

Pasal 6

Susunan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata adalah :

1. Ketua
2. Sekretaris
3. Bendahara
4. Seksi-seksi
5. Pembina
- 6.

Pasal 7

Kedudukan Rapat Anggota Kelompok Sadar Wisata adalah :

1. Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam Kelompok Sadar Wisata.
2. Setiap anggota mempunyai satu suara dalam rapat anggota dan tidak diwakilkan.
3. Rapat anggota dilaksanakan atas dasar musyawarah anggota kelompok.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

Kewajiban anggota Kelompok Sadar Wisata adalah :

Pengurus wajib untuk mengadakan rapat sekurang-kurangnya sebulan sekali atau setiap waktu jika dianggap perlu, didahului dengan undangan resmi atau lisan dan keterangan singkat tentang hal-hal yang dibicarakan. Semua rapat pengurus dipimpin oleh ketua, jika ketua tidak hadir diwakili oleh sekretaris atau bendahara. Dengan tidak mengurangi ketentuan ketentuan rapat dalam anggaran dasar ini, maka rapat anggota pengurus dianggap sah jikalau dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah pengurus, keputusan-keputusan rapat pengurus dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya setengah lebih satu dari jumlah yang hadir, dalam rapat anggota pengurus tiap-tiap anggota mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, apabila salah satu pengurus tidak hadir dalam rapat pengurus maka yang bersangkutan memberi kuasa kepada pengurus yang hadir

BAB VI PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 9

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Kelompok Sadar Wisata.

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS)
“ BERKAH MUDA ”**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan Anggaran Dasar. Anggaran Rumah Tangga Kelompok Sadar Wisata merupakan peraturan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 2

Anggaran Rumah Tangga Kelompok Sadar Wisata memuat ketentuan-ketentuan yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran Dasar.

Pasal 3

Anggaran Rumah Tangga dapat dirubah, ditambah dan dikurangi dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 Anggaran Rumah Tangga.

**BAB II
ORGANISASI**

**BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN ORGANISASI**

Pasal 4

Susunan Organisasi Kelompok Sadar Wisata terdiri dari :

1. Pembina (Camat, Petugas/Penyuluh, Perikanan, Kepala Desa)
2. Pengurus dan Anggota

**BAGIAN KEDUA
KEPENGURUSAN**

Pasal 5

1. Susunan Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata
 - a. Ketua
 - b. Sekretaris
 - c. Bendahara
 - d. Seksi-seksi
2. Pengurus dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 6

Masa jabatan pengurus ditetapkan sebagai berikut :

1. Masa jabatan pengurus adalah 3 (tiga) tahun.
2. Dalam reorganisasi pengurus lama dapat dipilih kembali.

Pasal 7

Persyaratan menjadi pengurus Kelompok Sadar Wisata adalah warga Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen yang sudah menjadi anggota kelompok.

Pasal 8

Pengurus bertugas dan bertanggungjawab sebagaimana dimaksud pada pasal 9, 10, dan 11 Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 9

Ketua Kelompok Sadar Wisata mempunyai tugas :

1. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan dan kebijakan lainnya yang ditetapkan dalam Rapat Anggota.
2. Memimpin rapat anggota dan rapat pengurus.
3. Ketua kelompok dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 10

Sekretaris Kelompok Sadar Wisata mempunyai tugas :

1. Membantu ketua kelompok di bidang ketatausahaan yang meliputi :
 - a. Surat menyurat, kearsipan pengadaan dan ekspedisi.
 - b. Pendataan anggota
 - c. Inventarisasi kekayaan kelompok
 - d. Lain-lain
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua kelompok.
3. Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada ketua kelompok.

Pasal 11

Bendahara Kelompok Sadar Wisata mempunyai tugas :

1. Membantu Ketua dibidang pengelolaan keuangan antara lain:
 - a. Menghimpun dan menyimpan uang.
 - b. Mengeluarkan uang sesuai ketentuan yang ada.
 - c. Melaksanakan pengurusan administrasi keuangan.
 - d. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan.
2. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua kelompok.
3. Bendahara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada ketua kelompok.

BAB III

SUMBER KEKAYAAN

Pasal 12

Kekayaan Kelompok Sadar Wisata terdiri dari :

1. Iuran Pokok Anggota sebesar Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah) yang dibayarkan sekali selama menjadi anggota dan dikembalikan ketika anggota dinyatakan keluar dari kelompok.
2. Iuran wajib anggota sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah) setiap bulan dan tidak dikembalikan ketika anggota dinyatakan keluar dari kelompok.
3. Menyerahkan hasil keuntungan sebesar 1% (satu persen)
4. Simpan pinjam keseluruhan kelompok akan diatur kemudian.

Lembupurwo, 05 Juni 2019
Ketua,

Marjuki



Lampiran 2 : Pedoman Hasil Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pedoman Wawancara Masyarakat

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai Desa Lembupurwo?
3. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?
4. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?
5. Bagaimana cara masyarakat mengetahui permasalahan dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?
6. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat?
7. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?
8. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?
9. Apakah pengembangan usaha didesa sudah berjalan dengan baik?

B. Pedoman Wawancara Pengelola Lahan Pesisir Pantai dan Perangkat Desa

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?
2. Apa saja potensi fisik dan non fisik Desa Lembupurwo?
3. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai Desa Lembupurwo?
4. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?
5. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?
6. Bagaimana sejarah berdirinya Pokdarwis?
7. Bagaimana proses pengenalan masalah dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?
8. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat pada proses pengkapasitasan?
9. Apa saja yang dilakukan Pokdarwis dalam proses pendayaan?
10. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat.

TRANSKIP HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara ini didapatkan dari beberapa informan yang terlibat dalam penelitian ini melalui lampiran pertanyaan yang peneliti berikan, yaitu :

A. Hasil Wawancara Kepada Kepala Desa Lembupurwo

Identitas Narasumber

Nama : Karto

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?

Jawaban : sejarahnya ya itu mba, dulunya banyak sapi-sapi disini. Nah lembu kan artinya sapi, kalau purwo itu kang kawitan. Ya gampangnya lembupurwo itu diawali sapi-sapi lah mba.

2. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : setau saya itu mba BUMDES sama kelompok pemuda itu.

3. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : produknya ya itu ada kebun sayur sayuran, buah buahan, terus ada pohon kelapa yang banyak mba.

4. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : masyarakat kurang mampu yang ga punya tanah sendiri mba.

5. Bagaimana cara masyarakat mengetahui permasalahan dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : ya kalau saya ya dengan neliti atau niteni mba hasil panen sekarang sama hasil panen kemaren-kemaren. Biasanya permasalahan paling karna hama si mba.

6. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat?

Jawaban : sudah sangat membantu mba. Pokdarwis ini sering membantu tenaga, pikiran sama kadang dibantu pembibitan mba.

7. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?

Jawaban : masyarakat sering mengikuti pelatihan pertanian atau seminar yang diadakan di desa. Jadi untuk menambah wawasan masyarakat yang memang masih awam mba.

8. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?

Jawaban : sudah baik kok mba. Kami sudah terbantu

9. Apakah pengembangan usaha didesa sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah juga mba. Sekarang usaha-usaha masyarakat sudah lumayan membaik. Soale banyak pedagang-pedagang yang udah kaya mba.

Identitas Narasumber

Nama : Marwan

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Petani

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?

Jawaban : -

2. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : BUMDES, desa, sama pokdarwis

3. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : banyak mba, ya itu kaya kebun kelengkeng, kebun jambu krital, sayur-sayuran, ada juga hutan-hutan rindang kaya mangrove itu dipinggir pesisir.

4. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : masyarakat miskin lah mba yang ga punya sawah.

5. Bagaimana cara masyarakat mengetahui permasalahan dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : ya niteni aja si mba. Hasil panen kemaren sama sekarang perbandingannya gimana.

6. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat ?

Jawaban : udah mbantu banget kok mba. Peran pokdarwis sudah bagus.

Jawaban :

7. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?

Jawaban : ya itu mba biasanya kan di desa ngadain seminar apa pelatihan gitu, nah masyarakatnya suruh ikut. Itu katanya untuk mengembangkan SDM mba.

8. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?

Jawaban : sudah bagus sudah efektif mba

9. Apakah pengembangan usaha didesa sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah mba. Sekarang masyarakat yang punya usaha sudah pada kaya kaya mba.

B. Hasil Wawancara Kepada Pengelola Lahan Pesisir Pantai dan Perangkat Desa Lembupurwo

Identitas Narasumber

Nama : Cokro Aminoto

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Kepala Desa

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?

Jawaban : awale ya adanya sapi, karna lembu itu artinya sapi dan purwo artinya kawitan. Nah dengan berkembangnya zaman, setiap rumah itu punya sapi dengan jenis brahma. Jadi sejarah terbentuknya desa lembupurwo sendiri adalah berawal dengan banyaknya sapi.

2. Apa saja potensi fisik dan non fisik Desa Lembupurwo?

Jawaban : potensi fisik ya dibidang pertanian, peternakan, perikanan, dan wisata. Non fisiknya adalah tingkat sosial dan kepedulian sesama masyarakat tinggi.

3. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : BUMDES dan Pemerintah Desa Lembupurwo

4. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : kebun buah kelengkeng yang terletak di Dukuh Aglik, gumuk pasir, hutan pinus, cemara rindang, hutan mangrove, telaga payau, kebun sayuran.

5. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : warga desa yang tidak memiliki lahan sendiri dan tidak mampu.

6. Bagaimana sejarah berdirinya Pokdarwis?

Jawaban : adanya kemiskinan pada tahun 2012 yang disebabkan gagal panen. Dan dari adanya kemiskinan tersebut pemuda di Desa Lembupurwo membentuk perkumpulan untuk menawarkan jasa bantu pertanian untuk menambah uang jajan, kemudian karna terlalu asik mereka membentuk Pokdarwis dengan izin pemerintah desa.

7. Bagaimana cara masyarakat mengetahui permasalahan dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : Dengan mengamati perkembangan hasil panen dari tanggal panen sebelum dan sesudahnya.

8. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat pada proses pengkapasitasan?

Jawaban : cukup membantu masyarakat dalam proses penggarapan lahan hingga pemasaran.

9. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?

Jawaban : melatih kemampuan yang sudah dimiliki masyarakat sendiri.

10. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?

Jawaban : sudah efektif. Dibuktikan dengan sudah berjalannya usaha masyarakat akibat pemupukan modal dari desa.

Identitas Narasumber

Nama : Wawan Setiawan

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Ketua BUMDES

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?

Jawaban : -

2. Apa saja potensi fisik dan non fisik Desa Lembupurwo?

Jawaban : potensinya ya banyak itu mba, peternakan bagus, perikanan lumayan juga, pertanian juga bagus, wisatanya juga bagus.

3. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : dari BUMDES, pemerintah desa sama pokdarwis mba.

4. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : ya paling itu mba kebun buah sama sayuran.

5. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : masyarakat yang kurang mampu yang belum punya lahan sendiri mba. Jadi bisa memanfaatkan lahan brosenjojo untuk digarap.

6. Bagaimana sejarah berdirinya Pokdarwis?

Jawaban : -

7. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat ?

Jawaban : sudah bagus mba, mereka anak-anak pokdarwis sangat membantu masyarakat kok.

8. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?

Jawaban : -

9. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?

Jawaban : menurut saya si udah efektif mba. Soale ya dari nggarap lahan brosenjojo ini masyarakat sudah terbantu si.

10. Apakah pengembangan usaha didesa sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah juga mba. Sudah baik perkembangan usaha masyarakat disini. Soale udah bisa impor ke luar kota mba.

Identitas Narasumber

Nama : Marjuki

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?

Jawaban : berawal dari sapi-sapian jaman dulu mba. Soalnya kan lembu sendiri artinya sapi, purwo artinya awalan.

2. Apa saja potensi fisik dan non fisik Desa Lembupurwo?

Jawaban : potensinya banyak si mba, dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan wisata. Non fisiknya ya warga disini sumeh-sumeh mba, ngga gengsi lah pokoknya.

3. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : BUMDES, pemerintah desa, dan dari pokdarwis. Sebenarnya masyarakat juga ikut bertanggung jawab si mba, Cuma ya sedikit lah.

4. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : perkebunan buah dan sayur mba. Mangrove, pinus, kelapa dan sebagainya.

5. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : masyarakat desa lembupurwo yang belum mempunyai lahan sendiri dan dianggap kurang mampu.

6. Bagaimana sejarah berdirinya Pokdarwis?

Jawaban : dulu pas lagi miskin miskin nya, anak muda disini jadi sering ngumpul, ya karna emang pada adu nasib lah mba. Dirumah terus juga bosen. Seringnya ngumpul itu dirumah saya, critanya rumah saya jadi basecamp lah mba. Pas itu karna semua anak muda kan pada ngrokok ya mba, jadi karna miskin itu kami pemuda jadi ga dikasih uang rokok. Kami bingung, akhirnya mutusin buat mbentuk usaha mba. Awale ya bisa dikatakan usaha buruh jasa mba. Upahnya ya cuma bisa buat beli rokok sama kopi lah mba. Kami sekelompok terdiri dari 6 orang. Akhire lama kelamaan penawaran jasanya laku akhire banyak yang gabung. Akhirnya kami memutuskan untuk membentuk kelompok untuk membantu masyarakat, tanpa imbalan. Karena ya itu mba, kasian yang ga punya uang tapi butuh bantuan. Tapi ya tetep dikasih cuma seikhlasnya aja mba.

7. Bagaimana cara masyarakat mengetahui permasalahan dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : mereka itu kadang niteni gitu mba, permasalahan dari panen kemaren sama sekarang hasilnya sebanding apa ngga. Modal mereka juga di perhatikan.

8. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat?

Jawaban : ya dari pokdarwis si Cuma mbantu sebisa kami aja mba. Yan penting masyarakat jadi bisa mengembangkan pertanian aja udah.

9. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?

Jawaban : ya mereka itu semangat mengikuti seminar mba, pelatihan juga. Apalagi kalau udah mbahas tentang pertanian dan yang gratis-gratis mba.

10. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?

Jawaban : menurut saya sudah efektif kok mba. Buktinya sampai saat ini garapan lahan brosenjojo berjalan lancar.

11. Apakah pengembangan usaha didesa sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah baik mba. Cuma tetep masih butuh peningkatan. Dari kualitas dan kuantitas terutama.

Identitas Narasumber

Nama : Sugito

Jenis kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Desa Lembupurwo?

Jawaban : sejarahnya saya kurang paham banget mba. Setau saya itu ya berawal dari dulunya banyak sapi-sapi dengan jenis brahma. Jenis ini itu sapi yang top pada zamannya mba. Dan paling banyak cuma disini. Jadi asal usulnya lembupurwo dari sapi itu.

2. Apa saja potensi fisik dan non fisik Desa Lembupurwo?

Jawaban : -

3. Siapa yang bertanggung jawab atas Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : penanggung jawabnya ya dari BUMDES, pemerintah desa, sama pokdarwis mba.

4. Apa saja produk yang dihasilkan dari Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : ada kebun kelengkeng, kebun jambu kristal, perkebunan sayur mayur, kelapa, dan mangrove mba.

5. Siapa saja yang berhak menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : masyarakat yang kurang mampu. Juga yang belum memiliki lahan untuk garapan sendiri.

6. Bagaimana cara masyarakat mengetahui permasalahan dalam menggarap Lahan Pesisir Pantai?

Jawaban : dengan niteni si mba biasane. Sebanding apa ngga sama modal yang dikeluarkan gitu.

7. Bagaimana peran Pokdarwis dalam membantu masyarakat?

Jawaban : kalau dari pokdarwis mah Cuma mbantu sebisanya aja mba. Ngga terlalu berlebihan. Tujuannya kan Cuma untuk mensejahterakan kemiskinan desa.

8. Bagaimana masyarakat mengembangkan sumber daya manusia?

Jawaban : ya mereka biasanya mengikuti seminar dan pelatihan mba.

9. Seberapa efektif proses pemupukan modal dari pemerintah desa kepada masyarakat?

Jawaban : menurut saya sudah efektif dan sudah baik mba.

10. Apakah pengembangan usaha didesa sudah berjalan dengan baik?

Jawaban : sudah baik mba. Hanya saja kadang perlu diperhatikan tingkat kualitas produk aja si.

Lampiran 3 : Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

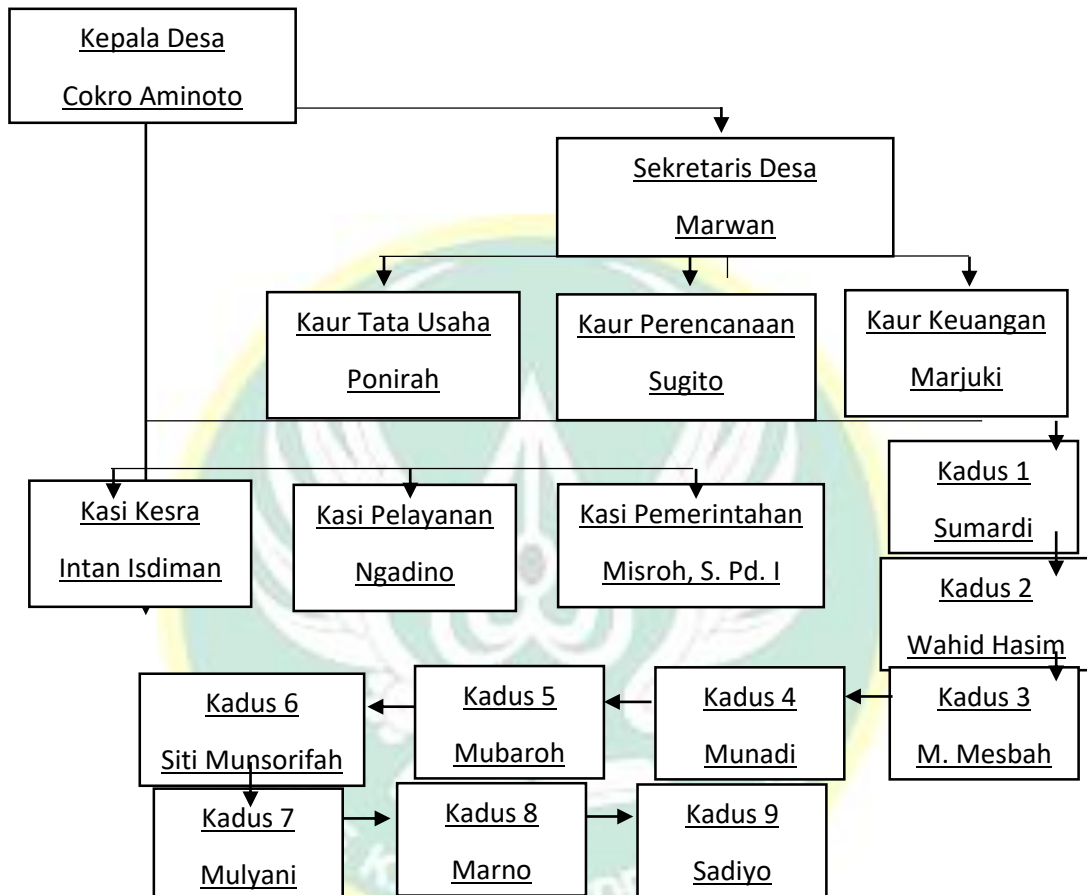
1. Melihat dan mengamati kondisi serta aktivitas masyarakat Desa Lembupurwo.
2. Melihat dan mengamati kondisi wisata yang ada di Desa Lembupurwo.
3. Melihat dan mengamati proses pemberdayaan yang dilakukan Pokdarwis kepada masyarakat.



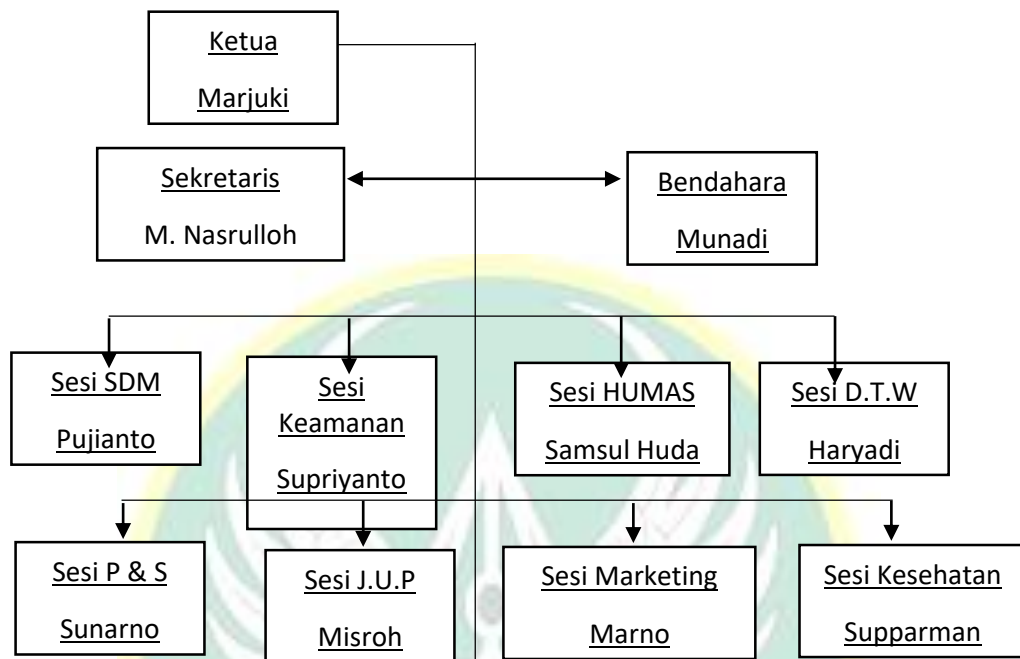
*Lampiran 4 : Struktur Pemerintahan Desa Lembupurwo dan Organisasi
Pengurus Pokdarwis.*

Bagan 2.1

**Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Lembupurwo
Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen 2023**



Bagan 2.2
Struktur Organisasi Pokdarwis “Berkah Muda” Pengelola Lahan Pesisir
Pantai



Lampiran 5 : Gambar Dokumentasi

DOKUMENTASI



Gambar 3.1 Perkebunan sayur sayuran di Lahan Brosengojo



Gambar 3.2 Perkebunan Palawija di Lahan Brosengojo



Gambar 3.3 Lokasi Lahan Pesisir Pantai (Tanah Brosengojo)



Gambar 3.4 Kebun Buah Kelengkeng yang berada di Lahan Pesisir Pantai



Gambar 3.5 Penyemprotan Obat Hama yang dibuat sendiri oleh masyarakat



Gambar 3.6 Bapak Sugito Anggota Kelompok Sadar Wisata, Wawancara dengan Penulis, Di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen



Gambar 3.7 Bapak Cokro Aminoto, Kepala Desa, Wawancara dengan penulis, di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen



Gambar 3.8 Bapak Marjuki, Ketua Kelompok Sadar Wisata “Berkah Muda”, Wawancara dengan Penulis, di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen



Gambar 3.9 Bapak Karto, Masyarakat Desa Lembupurwo, Wawancara dengan penulis, Di Desa Lembupurwo, Mirit, Kebumen



Gambar 3.10 Bapak Marwan, Masyarakat Desa Lembupurwo dan Bapak Wawan Setiawan, Ketua BUMDES Lembupurwo, Wawancara dengan penulis, di Desa Lembupurwo



Gambar 3.11 Pembibitan Tumbuhan Mangrove di Pesisir Pantai Laguna Lembupurwo



Gambar 3.12 Pelatihan Pembuatan Pupuk yang dilakukan oleh Kelompok Sadar Wisata dan Dinas Pertanian dan diikuti oleh Masyarakat Lembupurwo

SURAT PERNYATAAN PENGELOLAAN TANAH BROSENGOJO

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Cokro Aminoto

Jabatan : Kepala Desa Lembupurwo

Alamat : Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen

Dengan ini menyatakan bahwa,

1. Lahan Brosengojo di sewakan kepada 20 orang dengan bagian 5 hektare.
2. Per hektare dikelola oleh 4 orang.
3. Harga sewa pertahun sebanyak Rp.400.000/hektare. Atau setiap masyarakat membayar Rp.100.000/tahun.
4. Syarat mengelola tanah brosenjojo adalah warga desa lembupurwo, mampu membayar pajak, tergolong masyarakat miskin.
5. Setiap tahunnya pengelola tanah brosenjojo mengalami pergantian.
6. Masyarakat yang sudah pernah mengelola boleh mengelola kembali dengan catatan sudah tidak ada lagi pendaftar baru.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kebumen, 22 Januari 2024

Kepala Desa Lembupurwo,



Cokro Aminoto

BIOGRAFI PENULIS

Nama : Alpinurissangadah

Jenis kelamin : Perempuan

Tempat Tanggal Lahir : Kebumen, 09 Januari 2003

Alamat : Balorejo, Bonorowo, Kebumen

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

No Hp : 087890795390

Email : 2017104072@mhs.uinsaizu.ac.id

Riwayat Pendidikan

1. MI Assakinah Balorejo : 2008-2014
2. MTS Al-Islamiah Balorejo : 2014-2017
3. SMA N 1 Prembun : 2017-2020
4. UIN SAIZU Purwokerto : Dalam Proses

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Divisi Herbal Kader Lingkungan Hidup SMA N 1 Prembun Periode 2018-2019
2. Rohis SMA N 1 Prembun Divisi Tartil dan Sholawat periode 2018-2019
3. Forum Osis Kebumen Divisi Keagamaan periode 2018-2019
4. IPNU-IPPNU Ranting Bonorowo periode 2021-2023
5. Pengurus Putri Pondok Pesantren Nurul Iman Divisi Kegiatan periode 2021-2023
6. Ikatan Mahasiswa Kebumen Purwokerto (IMAKERTO) Kementerian Minat dan Bakat periode 2021-2022
7. Staff Senat Mahasiswa Fakultas Dakwah periode 2021-2022
8. Dewan Eksekutif Mahasiswa Divisi Pendidikan dan Budaya periode 2022-2023